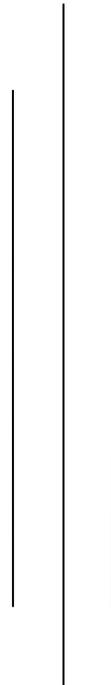




**RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SK BUPATI | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANG DAERAH | 6 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ranja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup..... | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup..... | 40 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup | 44 |
| 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah | 47 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 73 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 77 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi..... | 77 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup..... | 79 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 82 |
| BAB V PENUTUP | 106 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020..... | 17 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul..... | 43 |
| Tabel 2.3 | Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul..... | 48 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul..... | 74 |
| Tabel 3.1 | Prioritas dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup | 79 |
| Tabel 3.2 | Tujuan Dinas Lingkungan Hidup | 80 |
| Tabel 3.3 | Sasaran Dinas Lingkungan Hidup | 80 |
| Tabel 3.4 | Indikator Kinerja Utama..... | 81 |
| Tabel 4.1 | Prioritas Sasaran Daerah Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul | 84 |
| Tabel 4.2 | Rumus Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Gunungkidul | 92 |

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan urusan pemerintah daerah, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan susunan organisasi perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut berlakunya undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Setiap Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pada penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023 perlu dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tema Pembangunan Nasional dan DIY sebagai berikut :

- a. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2023 “ **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” “
- b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) tahun 2023 “ **Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di DIY** “

Sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung sumberdaya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berintegritas.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun menyesuaikan dengan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 yaitu: **“Peningkatan Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Infrastruktur dan SDM”**. Dalam hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada prioritas ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana dengan sasaran daerah kualitas lingkungan hidup meningkat. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi *stakeholder* dan dinamika perkembangan lingkungan strategis, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan. Rencana Kerja PD (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi rencana program dan kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Proses penyusunan Renja PD dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi: persiapan penyusunan Renja PD, penyusunan rancangan Renja PD, pelaksanaan forum PD, dan penetapan Renja PD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Mengingat Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan maka Rencana Kerja ini telah disinkronkan dengan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut, dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Secara rinci proses penyusunan Rencana Kerja disusun dengan proses sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang ditentukan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai arah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan kebutuhan pendanaan. Dengan disusunnya Renja ini diharapkan memudahkan dalam pengukuran kinerja Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 ini didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bisa sesuai dengan peraturan di tingkat pusat maupun daerah. Adapun dasar hukum untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
13. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 126/KPTS/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Gunungkidul;
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 250/0508 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 mengacu pada pencapaian indikator sasaran program yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 terdapat 10 program 16 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja pada tahun 2023. Adapun capaian target Renja Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Tahun 2021 yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Beberapa kegiatan yang didanai dari sumber dana APBD Tahun 2021 yang belum memenuhi target yang direncanakan meliputi program/kegiatan :

Pada Kegiatan :

1.1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:

1.1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (86,7)

1.1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (97,87)

b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (69,13)

1.1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (98,76)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (59,50)

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (99,71)

1.1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (97,47)

- 1.2 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (97,62)
 - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - c. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran (96,71)
- 1.3 Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan taman keanekaragam hayati di luar Kawasan hutan (99,95)
 - b. Pengelolaan kebun raya (99,94)
 - c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (90,53)
- 1.4 Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (98,76)
- 1.5 Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (95,38)
 - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (96,82)
- 1.6 Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (67,34)

- 1.7 Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota (99,41)
- 1.8 Program pengelolaan persampahan
Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (96,92)
 - b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (99,76)
- 1.9 Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
Pengelolaan taman hutan rakyat (TAHURA)
Pemulihan ekosistem atau penutupan Kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA kabupaten/kota (99,92)

2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021 yang memenuhi target kinerja yang direncanakan.

- 2.1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - 2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (100)
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (100)
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1000)
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (100)
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100)
 - 2.1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan(100)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (100)
 - 2.1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (100)

1.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Menyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100)
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100)
- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (100)

1.1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100)
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100)
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100)

1.1.5 Penataan Organisasi

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (100)

2.2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota (100)

2.3 Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati (100)

2.4 Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (100)

3. Realisasi Program/Kegiatan tahun 2021 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan :

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 tidak ada yang melebihi target kinerja keluaran.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2021

Faktor belum tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan di tahun 2021 sebagai berikut :

- 4.1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota:
 - 4.1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (86,71)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (87,02)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - 4.1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (97,87)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (69,13)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - 4.1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (98,76)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (59,50)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (99,71)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - 4.1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (97,47)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- 4.2 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - 4.2.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (97,62)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.

- 4.2.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran (96,71)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- 4.3 Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- a. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan (99,95)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - b. Pengelolaan kebun raya (99,94)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (90,53)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- 4.5 Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (98,76)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- 4.6 Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (95,38)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (96,82)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- 4.7 Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (67,34)
Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.

- 4.8 Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota (99,41)
 Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- 4.9 Program pengelolaan persampahan
 Pengelolaan Sampah
- a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (98,35)
 Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
 - b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (99,78)
 Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.
- 4.10 Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
 Pengelolaan taman hutan rakyat (TAHURA)
 Pemulihan ekosistem atau penutupan Kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA kabupaten/kota (99,92)
 Tidak tercapainya target 100% karena efisiensi belanja.

5 Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2022

- a. Timbulan Sampah yang Semakin Banyak
 Jumlah penduduk yang semakin bertambah, jumlah pengunjung wisata yang semakin meningkat, semakin meningkatnya kemampuan ekonomi, produk akibatkan timbulan sampah semakin banyak. Di sisi lain peran aktifitas dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat akan peran serta masyarakat dan pengusaha dalam upaya meminimalisasi sampah masih rendah.
- b. Kapasitas pelayanan yang terbatas
 Kapasitas pelayanan persampahan yang masih terbatas karena :
 - 1) Paradigma lama pengelolaan sampah yang mengandalkan proses (kumpul-angkut-buang), dan
 - 2) Prioritas pendanaan dan pemenuhan sumber daya manusia yang belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan

c. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi khususnya media sosial juga berdampak negatif pada simpang siurnya kebenaran informasi program pemerintah yang diterima oleh masyarakat, diantaranya :

- 1) Program sering dianggap bukan program pemerintah, namun program yang diadakan secara swadaya oleh organisasi non pemerintah. Sehingga masyarakat sering salah mengerti, akhirnya partisipasi masyarakat menjadi minim dan imbasnya pada program. Program pengelolaan sampah menjadi terkendala dan gagal.
- 2) Sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam menghadapi perubahan. Masyarakat pedesaan sering dihadapkan pada perubahan yang tidak mereka mau. Untuk membiasakan diri buang sampah tidak di sembarang tempat misalnya, merupakan hal yang sulit.
- 3) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang program yang sedang berjalan membuat program tak seratus persen berjalan dan berhasil.

d. Dampak COVID-19

Upaya untuk pengendalian penyebaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah juga berdampak negatif yang muncul antara lain bertambahnya jumlah sampah rumah tangga dan sampah medis, dan pencemaran lingkungan dari penyemprotan disinfektan. Peningkatan sampah medis yang disebabkan oleh COVID-19 juga berpotensi menularkan penyakit seperti plastik medis, sarung tangan, dan masker. Selain itu, masalah pelayanan persampahan juga muncul akibat pandemi COVID-19 seperti transportasi pengangkutan sampah rumah tangga, sampah wisata dan limbah B3 baik medis maupun rumah tangga menjadi terhambat. Meskipun terdapat dampak negatif, ada pula dampak positif yang ditimbulkan oleh penanganan pemerintah terhadap penyebaran COVID-19. Polusi udara mulai berkurang karena kegiatan sebagian industri masyarakat, kendaraan bermotor dan kendaraan umum menjadi tidak beroperasi sehingga mengurangi jumlah karbon monoksida yang dihasilkan. Berkurangnya jumlah emisi karbon monoksida dan nitrogen dioksida akan menghasilkan udara yang sehat.

e. Sikap Masyarakat

Kendala terbesar untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah masih adanya rasa ketergantungan terhadap orang lain untuk menjaga lingkungan. Membuang sampah sembarangan dengan

anggapan ada tukang sampah yang akan membersihkan sampah yang mereka buang. Sikap ketergantungan tersebut akan membuat banyak orang menjadi lebih malas dan tak punya kesadaran untuk cinta pada lingkungan.

f. Masalah Persetujuan Lingkungan

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai persetujuan lingkungan hidup harus sesuai dengan UUPPLH yang merupakan perangkat hukum terutama terkait hal yang bersifat preventif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan persetujuan. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha merupakan solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan. Semangat Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, khususnya bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini salah satunya adalah menyederhanakan hal-hal yang selama ini dinilai relatif rumit, agar kemanfaatannya lebih efisien dan efektif. Misalnya, tentang izin lingkungan, bahwa Izin Lingkungan tidak dihilangkan, namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha. Selain itu, pengintegrasian kembali izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha, memperkuat posisi perlindungan terhadap lingkungan hidup. Persyaratan dan kewajiban lingkungan tetap dapat di-*enforce*, karena termuat (terintegrasikan) dalam perizinan berusaha.

“Terkait AMDAL, dalam pengaturan tata laksana uji kelayakan lingkungan, yang dulunya bernama Komisi Penilai Amdal (KPA) diganti dengan “Lembaga Uji Kelayakan” yang terdiri dari “Tim Uji Kelayakan” yang ada di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta *Adhoc* yang penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, juga dalam penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, namun tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM pembina masyarakat terkena dampak tersebut. Hal tersebut dilakukan agar fungsinya dapat lebih efektif dan optimal.

Faktor penghambat dalam penerbitan persetujuan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul adalah :

- 1) Tidak ada aturan yang jelas tentang biaya.

Ketidajelasan biaya yang dikeluarkan dalam proses persetujuan dan penilaian dokumen lingkungan untuk syarat penerbitan persetujuan lingkungan ini karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur secara jelas berapa tarif yang harus dikeluarkan oleh pemrakarsa dalam proses pengurusan persetujuan lingkungan tersebut. Tidak adanya tarif yang jelas untuk pembuatan dan proses mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan untuk AMDAL dan/ atau rekomendasi UKL-UPL, mengakibatkan Pemrakarsa menganggap membuat dokumen lingkungan itu sulit dan mahal.

- 2) Minimnya Konsultan Penyusun Dokumen AMDAL di Kabupaten Gunungkidul. Untuk penerbitan persetujuan lingkungan harus didahului dengan Proses persetujuan dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Hal ini tentunya pemrakarsa harus menyusun dokumen tersebut. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tim penyusun dokumen AMDAL harus mempunyai kualifikasi atau sertikat kompetensi sebagai penyusun dokumen AMDAL.

Di Kabupaten Gunungkidul tim penyusun yang mempunyai sertifikat kompetensi belum ada sehingga pemrakarsa kesulitan dalam penyusunan. Sehingga pemrakarsa harus mencari tim penyusun keluar daerah, hal inilah yang membuat proses atau tahapan pemrakarsa untuk melakukan permohonan akan terhambat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul sudah mengantisipasi menyesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Kabupaten. Penilaian dan penerbitan Persetujuan Lingkungan pun juga selalu berkoordinasi dengan DPMPSTSP terkait OSS RBA, termasuk kegiatan pengawasan usaha dan atau kegiatan.

6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengedepankan skala prioritas terutama untuk program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Program kegiatan utama harus diberikan prioritas lebih dibandingkan dengan program dan kegiatan pendukung, sehingga target kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai serta fokus pada target capaian

kinerja yang telah dibuat dan mencari terobosan dana agar tidak hanya mengandalkan APBD saja.

Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2022
Kabupaten Gunungkidul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target Capaian Program kinerja (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2020 | Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD tahun 2021 | | | Target program / kegiatan Renja PD Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan | |
|-----------------|--|---|--|---|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2021 | Realisasi Renja PD Tahun 2021 | Tingkat realisasi (%) | | Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Outcome Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik | 100 Persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 | 100 | 100 persen | 100 |
| X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | output Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 28 dokumen | 28 dokumen | 28 dokumen | 28 dokumen | 100 | 28 | 28 dokumen | 100 |
| | | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu | 100 Persen | 100 persen | 28 dokumen | 28 dokumen | 100 | 28 | 28 dokumen | 28 |
| X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Forum PD | 1 Kali | 1 kali | 1 kali | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Profil | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Renja | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Renja Perubahan | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|------------|-------------------|-----------|
| X.XX.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 | 1 | 1 | 100 |
| X.XX.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 0 dokumen | 0,00 | 1 | 1 | 100 |
| X.XX.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen ROPK | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 | 100 |
| X.XX.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 | 1 | 1 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 | 1 | 1 | 100 |
| X.XX.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen LKjIP | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 | 100 |
| | | Jumlah Laporan Monev | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 | 4 | 4 | 100 |
| | | Jumlah Laporan TEPPA | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 | 12 | 12 | 100 |
| X.XX.01.2.02 | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | <i>3 layanan</i> | <i>3 layanan</i> | <i>3 layanan</i> | <i>3 layanan</i> | 100 | 3 | <i>3 layanan</i> | 100 |
| | | <i>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</i> | <i>100 persen</i> | <i>100 persen</i> | <i>100 persen</i> | | 0,00 | <i>100</i> | <i>100 persen</i> | 100 |
| X.XX.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | 14 bulan | 14 bulan | 14 bulan | 100,00 | 14 | 14 bulan | 100 |
| X.XX.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 dokumen | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
|-----------------|---|--|------------|------------|------------|------------|---------|-----|------------|-----------|
| X.XX.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Dokumen Laporan semesteran | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 dokumen | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 | 12 | 12 dokumen | 100 |
| X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terlayani | 46 orang | 54 orang | 50 orang | 50 Orang | 100 | 50 | 50 orang | 109 |
| | | Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 | 100 | 100 persen | 100 |
| X.XX.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah ASN yang tertangani | 43 orang | 54 orang | 50 orang | 43 orang | 86 | 48 | 48 orang | 111,63 |
| X.XX.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti diklat | 3 orang | 2 orang | 0 orang | 0 orang | 0,00 | 2 | 2 orang | 66,67 |
| X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 layanan | 5 layanan | 5 layanan | 5 layanan | 0,00 | 5 | 5 layanan | 100 |
| | | Persentasi administrasi umum terlayani | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| X.XX.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen listrik tersedia | 4 paket | 8 jenis | 10 paket | 10 paket | 100 | 4 | 4 paket | 100 |
| X.XX.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ATK yang terbeli | 12 paket | 23 jenis | 23 paket | 23 paket | 100,00 | 12 | 12 paket | 100 |
| | | Jumlah Scanner Digital yang terbeli | 0 unit | - unit | - unit | - unit | 0,00 | 1 | 1 unit | 0,00 |
| | | Jumlah laptop yang terbeli | 2 unit | - unit | - unit | - unit | 0,00 | 2 | 2 unit | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
|-----------------|---|---|------------------|--------------|------------------|------------------|---------|-------|------------------|-----------|
| | | Jumlah mesin fax | 0 unit | unit | unit | unit | 0,00 | 1 | 1 unit | 0,00 |
| | | Jumlah komputer yang terbeli | 2 unit | unit | unit | unit | 0,00 | 2 | 2 unit | 100 |
| | | Jumlah printer yang terbeli | 1 unit | unit | unit | unit | 0,00 | - | 0 unit | 0,00 |
| X.XX.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah cetak | 160 bendel | 32 bendel | 160 bendel | 160 bendel | 100,00 | 160 | 160 bendel | 100 |
| | | Jumlah fotocopy | 150 lembar 00 | 4.000 lembar | 150 lembar 00 | 150 lembar 00 | 100 | 15000 | 1500 0 lembar | 100 |
| X.XX.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah rekening langganan surat kabar | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100 | 12 | 12 bulan | 100 |
| X.XX.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam daerah | 30 OH | 79 OH | 50 OH | 30 OH | 60 | 30 | 30 OH | 100 |
| | | Jumlah snack dan minum rapat | 600 OR | 310 OR | 600 OR | 450 OR | 75,00 | 600 | 600 OR | 100 |
| X.XX.01.2.07 | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | <i>Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah</i> | 0 | - | | | 0,00 | 3 | 3 unit | 0,00 |
| | | <i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana dengan baik</i> | 0 persen | - persen | - persen | - persen | 0,00 | 100 | 100 persen | 0,00 |
| X.XX.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Audio Visual yang terbeli | 0 unit | unit | unit | unit | 0,00 | - | 0 unit | 0,00 |
| | | Jumlah CCTV yang terbeli | 0 unit | unit | unit | unit | 0,00 | 1 | 1 unit | 0,00 |
| | | Jumlah kamera yang terbeli | 0 unit | unit | unit | unit | 0,00 | - | 0 unit | 0,00 |
| | | Jumlah GPS Handheld terbeli | 0 unit | unit | unit | unit | 0,00 | 1 | 1 unit | 0,00 |
| | | Jumlah Drone terbeli | 0 unit | unit | unit | unit | 0,00 | 1 | 1 unit | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
|------------------|--|--|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|------|-------------|-----------|
| X.XX.01.2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah layanan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 3 layanan | 3 layanan | 3 layanan | 3 layanan | 100,00 | 3 | 3 layanan | 100 |
| | | Persentasi penyediaan jasa penunjang terlaksana dengan baik | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| X.XX.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang dikelola | 200 surat | 0 surat | 20 kali | 2 kali | 10,00 | 2000 | 2000 surat | 100 |
| X.XX.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening telepon | 12 rekening | 12 rekening | 12 rekening | 12 rekening | 100 | 12 | 12 rekening | 100 |
| | | Jumlah Rekening Air | 12 rekening | 12 rekening | 12 rekening | 12 rekening | 100 | 12 | 12 rekening | 100 |
| | | Jumlah Rekening listrik | 24 rekening | 24 rekening | 24 rekening | 24 rekening | 100 | 24 | 24 rekening | 100 |
| X.XX.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa kebersihan cleaning service | 3 termin | 3 termin | 3 termin | 3 termin | 100,00 | 3 | 3 termin | 100 |
| X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 61 unit | 61 unit | 61 unit | 61 unit | 0,00 | 61 | 61 unit | 100 |
| | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terfasilitasi | 100 persen | persen persen | 100 persen | 100 persen | 100,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| X.XX.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 100 | 4 | 4 unit | 100 |
| | | Jumlah mobil yang terpelihara | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 100 | 4 | 4 unit | 100 |
| | | Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya | 10 unit | 8 unit | 10 unit | 10 unit | 100 | 10 | 10 unit | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|-------------------|-----------|
| | | Jumlah motor yang terpelihara | 10 unit | 8 unit | 10 unit | 10 unit | 100 | 10 | 10 unit | 100 |
| X.XX.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah komputer terfasilitasi pemeliharaannya | 15 unit | 4 unit | 7 unit | 7 unit | 100 | 15 | 15 unit | 100 |
| | | Jumlah laptop terfasilitasi pemeliharaannya | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 100 | 5 | 5 unit | 100 |
| | | Jumlah mesin ketik terfasilitasi pemeliharaannya | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 100,00 | 4 | 4 unit | 100 |
| | | Jumlah printer terfasilitasi pemeliharaannya | 10 unit | 8 unit | 10 unit | 10 unit | 100 | 10 | 10 unit | 100 |
| X.XX.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang terfasilitasi pemeliharaannya | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 100 | 1 | 1 unit | 100 |
| X.XX.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah AC terfasilitasi pemeliharaannya | 12 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 100 | 12 | 12 unit | 100 |
| X.XX.01.2.13 | <i>Penataan Organisasi</i> | <i>Jumlah dokumen Penataan Organisasi</i> | <i>5 dokumen</i> | <i>5 dokumen</i> | <i>5 dokumen</i> | <i>5 dokumen</i> | 0,00 | 5 | <i>5 dokumen</i> | 100 |
| | | <i>Persentase Penataan Organisasi terlaksana dengan baik</i> | <i>100 persen</i> | <i>100 persen</i> | <i>100 persen</i> | <i>100 persen</i> | 100,00 | <i>100</i> | <i>100 persen</i> | 100 |
| X.XX.01.2.13.02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen RTP/SPIP | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 2 | 2 dokumen | 100 |
| | | Jumlah Dokumen SOP | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 1 | 1 dokumen | 100 |
| | | Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | 2 | 2 dokumen | 100 |

| 1.03.13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100,00 | 25 | 25 persen | 25 |
|---------------------|---|---|---------------|------------|------------|------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 1.03.13.2.0 2 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah layanan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 1 layanan | 1 layanan | 1 layanan | 1 layanan | 100,00 | 1 | 1 layanan | 100 |
| | | Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten terlaksana dengan baik | 100 persen | - persen | 100 persen | | 0,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| 1.03.13.2.0 2.03 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu | Terbangunnya Talud | 141 m3 2,4 | - m3 | m3 | | 0,00 | 1412,3 9 | 1412 m3 ,39 | 100 |
| | | Terbangunnya Jalan Setapak | 990, m2 4 | - m2 | m2 | | 0,00 | 990,4 | 990, m2 4 | 100 |
| | | Terbangunnya Drainase dan Pemipaan Penyiraman | 403 m | - m | m | | 0,00 | 403 | 403 m | 100 |
| | | Terbangunnya Kolam dan Instalasi | 78 m2 | - m2 | m2 | | 0,00 | 78 | 78 m2 | 100 |
| | | Terbangunnya Etalase Batu Geopark Gunung Sewu | 28 unit | - unit | unit | | 0,00 | 28 | 28 unit | 100 |
| | | Terbangunnya Taman Parkir | 339, m2 1 | - m2 | m2 | | 0,00 | 339,1 | 339, m2 1 | 100 |
| | | Terbangunnya Pagar Pengaman Tanaman | 560 m2 | - m2 | m2 | | 0,00 | 560 | 560 m2 | 100 |
| | | Penanaman Vegetasi | 119 m2 5 | - m2 | m2 | | 0,00 | 1195 | 1195 m2 | 100 |
| | | Tersedianya Penerangan | 14 unit | - unit | unit | | 0,00 | 14 | 14 unit | 100 |
| | | Tersedianya Gazebo | 5 unit | - unit | unit | | 0,00 | 5 | 5 unit | 100 |
| | | Tersedianya Toilet | 1 unit | - unit | unit | | 0,00 | 1 | 1 unit | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|---------|-----------|------------------|-----------|
| | | Tersedianya Septictank Biofil | 1 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | 1 | 1 unit | 100 |
| | | Tersedianya CCTV | 3 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | 3 | 3 unit | 100 |
| | | Tersedianya Peresapan | 1 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | 1 | 1 unit | 100 |
| | | Tersedianya Tempat Sampah | 15 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | 15 | 15 unit | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | Tersedianya Tempat Cuci Tangan | 8 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | 8 | 8 unit | 100 |
| | | Tersedianya Ramp | 64,8 m2 | - m2 | - m2 | - | 0,00 | 64,8 | 64,8 m2 | 100 |
| | | Tersedianya Tangga | 315 m2 | - m2 | - m2 | - | 0,00 | 315 | 315 m2 | 100 |
| 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengendalian Pencemaran | 70 persen | 30 persen | 60 persen | | 0,00 | 50 | 50 persen | 71,43 |
| 2.11.03.2.0 1 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 2 layanan | 2 layanan | 2 layanan | 2 layanan | 100,00 | 2 | 2 layanan | 100 |
| | | Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten terlaksana dengan baik | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| 2.11.03.2.0 1.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah buku laporan pemantauan kualitas lingkungan yang tersusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00 | 1 | 1 dokumen | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|-----------|-----------|
| | | Jumlah Gerakan Kali Bersih | 10 kali | - kali | - | - | #DIV/0! | 4 | 4 | 40 |
| | | Jumlah Forum Komunikasi Pemerhati Kali | 2 kali | - kali | - | - | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 |
| | | Jumlah bangunan IPAL Komunal di Industri UMKM | - unit | - unit | - | - | 0,00 | - | - | #DIV/0! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2.11.03.2.0 1.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah bimtek Laboratorium terlaksana | 2 kali | - kali | 2 kali | 2 kali | 100,00 | 2 | 2 kali | 100 |
| | | Jumlah bahan kimia terbeli | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100 | 1 | 1 paket | 100 |
| | | Jumlah peralatan gelas (glassware) dan perlengkapan laboratorium terbeli | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100 | 1 | 1 paket | 100 |
| | | Jumlah alat laboratorium terpelihara | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 10 unit | 100 | 10 | 10 unit | 100 |
| | | Jumlah alat laboratorium terbeli | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100 | 1 | 1 paket | 100 |
| | | Jumlah pengolahan limbah | 1 paket | 1 ls | 1 paket | 1 paket | 100,00 | 1 | 1 paket | 100 |
| | | Jumlah rapat koordinasi terlaksana | 3 kali | 2 kali | 3 kali | 3 kali | 100,00 | 3 | 3 kali | 100 |
| | | Jumlah Uji Profesiensi terlaksana | 3 kali | 1 kali | 3 kali | 3 kali | 100,00 | 3 | 3 kali | 100 |
| | | Jumlah akreditasi/Survailen laboratorium terlaksana | 1 kali | - kali | - kali | - kali | 0,00 | 1 | 1 kali | 100 |
| | | Jumlah alat laboratorium terbeli (DAK) | 0 paket | - paket | - paket | - paket | 0,00 | 1 | 1 paket | 0,00 |
| 2.11.03.2.0 2 | Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota | Jumlah layanan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 2 layanan | 2 layanan | 2 layanan | 2 layanan | 0,00 | 2 | 2 layanan | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | <i>Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terlaksana dengan baik</i> | <i>100 persen</i> | <i>100 persen</i> | <i>100 persen</i> | <i>100 persen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100 persen</i> | <i>100</i> |
| 2.11.03.2.0 2.01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Dokumen IKPLHD tersusun | 2 | doku men 2 | 2 dokumen | 2 dokumen | 100,00 | 2 | 2 dokumen | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2.11.03.2.0 2.03 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Pemantauan kualitas lingkungan untuk penanganan antrax | 20 sampel | - sampel | - sampel | - sampel | 0,00 | 20 | 20 sampel | 100 |
| 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik | 58 persen | 50 persen | 50 persen | | 0,00 | 52 | 52 persen | 89,6551 7241 |
| 2.11.04.2.0 1 | <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i> | <i>5 layanan</i> | 5 <i>layanan</i> | <i>5 layanan</i> | <i>5 layanan</i> | 1,00 | 5 | <i>5 layanan</i> | 100 |
| | | <i>Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten terlaksana dengan baik</i> | <i>0 persen</i> | - <i>persen</i> | 0,4 <i>persen</i> | | 0,00 | 0,6 | 0,6 <i>persen</i> | 0,00 |
| 2.11.04.2.0 1.02 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | Jumlah lokasi penanaman Pohon di Sumber Mata Air | 1 lokasi | - lokasi | - lokasi | - | 0,00 | - | 0 lokasi | 0,00 |
| | | Jumlah lokasi penanaman Pohon di tepi Jalan | 1 lokasi | - lokasi | - lokasi | - | 0,00 | - | 0 lokasi | 0,00 |
| | | Jumlah lokasi Penanaman Pohon di Sempadan Pantai | 1 lokasi | - lokasi | - lokasi | - | 0,00 | - | 0 lokasi | 0,00 |
| | | Jumlah lokasi Penanaman Pohon di Sempadan Sungai | 1 lokasi | - lokasi | - lokasi | - | 0,00 | - | 0 lokasi | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|----------|----------|----------|---------|----|----------|-----------|
| | | Jumlah lokasi Penghijauan Lingkungan | 1 lokasi | - lokasi | - lokasi | - | 0,00 | 7 | 7 lokasi | 700 |
| | | Jumlah lokasi penanaman Pohon di Geosite | 1 lokasi | - lokasi | - lokasi | - | 0,00 | - | 0 lokasi | 0,00 |
| 2.11.04.2.0 1.03 | Pengelolaan Kebun Raya | Jumlah paket Pembangunan di Hutan Kota Tawarsari, Wonosari | 1 lokasi | - lokasi | - lokasi | - | 0,00 | 1 | 1 lokasi | 100 |
| | | Jumlah Pembangunan shelter bibit di Taman Hutan Kota | 1 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | 0 paket | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | Jumlah pengelolaan hutan kota terpelihara | 1 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | - | 0 unit | 0,00 |
| | | Jumlah pengelolaan shelter bibit di Taman Hutan Kota | 12 lokasi | - lokasi | - lokasi | - | 0,00 | - | 0 lokasi | 0,00 |
| | | Terbangunnya Fasilitas di Taman Hutan Kota | 0 bulan | - bulan | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 | - | 0 bulan | 0,00 |
| 2.11.04.2.0 1.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah mobil dinas operasional pemeliharaan taman yang terpelihara | 3 unit | 2 unit | 2 unit | 1 unit | 50 | 3 | 3 unit | 100 |
| | | Jumah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya | 2 unit | 2 unit | - unit | - | 0,00 | 2 | 2 unit | 100 |
| | | Jumah motor dinas yang terbayarkan pajaknya | 6 unit | 4 unit | 2 unit | 2 unit | 100 | 6 | 6 unit | 100 |
| | | Jumlah motor dinas operasional pemeliharaan taman yang terpelihara | 6 unit | 4 unit | 6 unit | 6 unit | 100,00 | 6 | 6 unit | 100 |
| | | Jumlah pakaian petugas keamanan terbeli | 4 stell | - stell | - stell | 0 | 0,00 | 4 | 4 stell | 100 |
| | | Jumlah pakaian petugas taman terbeli | 22 stell | - stell | - stell | 0 | 0,00 | 22 | 22 stell | 100 |
| | | Jumlah taman terpelihara | 16 taman | 16 taman | 16 taman | 12 taman | 75 | 16 | 16 taman | 100 |
| | | Jumlah skylift truck terbeli | 0 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | - | 0 unit | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Playen tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | 1 | 1 dok | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|----------|---|---------|---|----------|-----------|
| | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Nglipar tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | 1 | 1 dok | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen Redesign DED RTH Taman Kota tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | 1 | 1 dok | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen Redesign DED wajah kota Tugu Siyono sampai dengan Alun-alun tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | 1 | 1 dok | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | Jumlah dokumen Redesign DED Taman Parkir tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | - | - dok | 0,00 |
| | | Pengembangan Taman Edukasi Wukirsari, Wonosari | 1 lokasi | - lokasi | - lokasi | - | 0,00 | 1 | 1 lokasi | 100 |
| | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Ponjong tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | - | - dok | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Saptosari tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | - | - dok | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen DED RTH Batas Kota Rongkop tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | - | - dok | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Semanu tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | - | - dok | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Karangmojo tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | - | - dok | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH Kapanewon Playen | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | 1 | 1 paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH Kapanewon Nglipar | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | 1 | 1 paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH wajah kota Tugu Siyono sampai dengan Alun- Alun | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | 1 | 1 paket | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------|----------|----------|---|---------|----|----------|-----------|
| | | Pembangunan RTH Pengembangan Taman Kota | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | 1 | 1 paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH taman Parkir | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen DED Batas kota Purwosari | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | - | - dok | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Girisubo tersusun | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | - | - dok | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen DED RTH KapanewonTepus | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | - | - dok | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Tanjungsari | 0 dok | - dok | - dok | - | 0,00 | - | - dok | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH batas kota Rongkop | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH Kapanewon Saptosari | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH Kapanewon Ponjong | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH Kapanewon Semanu | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH Kapanewon Karangmojo | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH Kapanewon Girisubo | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH Kapanewon Tepus | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH batas kota Purwosari | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Pembangunan RTH Kapanewon Tanjungsari | 0 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Jumlah Papan Rambu Lingkungan Hidup | 10 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | 20 | 20 unit | 0,00 |
| 2.11.04.2.0 1.05 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Jumlah Taman KEHATI terkelola dengan baik | 3 lokasi | 3 lokasi | - lokasi | - | 0,00 | 3 | 3 lokasi | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|
| 2.11.04.2.0 1.07 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Jumlah Alat Biopori yang tersedia | 0 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | 32 | 32 unit | 0,00 |
| 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup | 82 persen | 32 persen | 32 persen | | 0,00 | 42 | 42 persen | 51,22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2.11.08.2.0 1 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah layanan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 3 layanan | 3 layanan | 3 layanan | 3 layanan | 0,00 | 3 | 3 layanan | 100 |
| | | Jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | 1 layanan | | 1 layanan | | 0,00 | 100 | 1 layanan | 100 |
| 2.11.08.2.0 1.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah pelatihan manajemen bank sampah terlaksana | 2 kali | - kali | kali | | 0,00 | 2 | 2 kali | 100 |
| | | Jumlah pelatihan pengolahan sampah anorganik terlaksana | 2 kali | 2 kali | - kali | | 0,00 | 2 | 2 kali | 100 |
| | | Jumlah pelatihan pengolahan sampah organik terlaksana | 2 kali | - kali | - kali | | 0,00 | 2 | 2 kali | 100 |
| | | Jumlah Pelatihan pemilahan sampah terlaksana | 1 kali | - kali | - kali | | 0,00 | 1 | 1 kali | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|---------|----|------------|-----------|
| | | Jumlah Kemah bakti, rekrutmen anggota saka baru, sosialisasi saka kalpataru, pembinaan saka kalpataru terlaksana | 1 kali | - kali | - kali | | 0,00 | 0 | 0 kali | 0 |
| | | Jumlah pelaku usaha yang menerima sosialisasi | 0 kali | - kali | 0 kali | | 0,00 | 1 | 1 kali | 0,0 |
| 2.11.08.2.0 1.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen laporan hasil monitoring Adipura dan Jakstrada tersusun | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dokumen | 0,00 | 2 | 2 dok | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | Frekuensi monitoring Adipura dan Jakstrada | 2 periode | 2 periode | 2 periode | 2 periode | 0,00 | 2 | 2 periode | 100 |
| | | Jumlah kelengkapan Adipura yang tersusun | 2 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dokumen | 0,00 | 2 | 2 dok | 100 |
| | | Jumlah Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten | 12 sekolah | 16 sekolah | 12 sekolah | 12 sekolah | 100 | 12 | 12 sekolah | 100 |
| | | Jumlah Sekolah yang dibina dan dievaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup | 40 sekolah | 12 sekolah | 65 sekolah | 65 sekolah | 100,00 | 40 | 40 sekolah | 100 |
| | | Jumlah sekolah yang didampngi untuk menjadi sekolah Adiwiyata TK DIY dan Nasional serta mandiri | 28 sekolah | sekolah | 28 sekolah | 28 sekolah | 100,00 | 28 | 28 sekolah | 100 |
| | | Jumlah sosialisai pengeloaan sampah | 10 kali | 5 kali | kali | | 0,00 | 10 | 10 kali | 100 |
| | | Jumlah pertemuan JPSM terlaksana | 4 kali | - kali | 4 kali | 4 kali | 100 | 4 | 4 kali | 100 |
| | | Jumlah rumah sampah terbangun | 1 paket | - paket | paket | | 0,00 | 1 | 1 paket | 100 |
| | | Jumlah Workshop JPSM terlaksana | 1 kali | - kali | 1 kali | 1 kali | 100 | 1 | 1 kali | 100 |
| 2.11.08.2.0 1.03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah peringatan hari peduli sampah dan hari lingkungan hidup terlaksana | 2 | - | | | 0,00 | 2 | 2 | 100 |
| | | Jumlah penyuluhan Proklim terlaksana | 3 | - | 3 lokasi | 3 lokasi | 0,00 | 3 | 3 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------------|------------------|-----------|----------|---------|-----------|------------------|-----------|
| | | Jumlah penyuluhan KEHATI terlaksana | 3 | - | 3 lokasi | 3 lokasi | 0,00 | 3 | 3 | 100 |
| | | Jumlah penyuluhan Ekowisata terlaksana | 1 | - | 30 orang | 30 orang | 0,00 | 1 | 1 | 100 |
| 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup | 70 persen | 15 persen | 15 persen | | 0,00 | 18 | 18 persen | 25,71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2.11.09.2.0 1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 7 kali | - kali | | | 0,00 | 4 | 4 kali | 57,14 |
| | | Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik | 100 persen | 100 persen | | | 0,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| 2.11.09.2.0 1.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Penghargaan Proklamasi | 2 kali | - kali | kali | kali | 0,00 | 0 | 0 kali | 0,00 |
| | | Jumlah penghargaan KEHATI | 1 kali | kali | 1 kali | 1 kali | 0,00 | 0 | 0 kali | 0 |
| | | Jumlah Evaluasi kalpataru 4 kategori | 1 kali | - kali | 0 kali | 0 kali | 0,00 | 1 | 1 kali | 100 |
| | | Jumlah Evaluasi bank sampah | 1 kali | - kali | 0 kali | 0 kali | 0,00 | 1 | 1 kali | 100 |
| | | Jumlah Evaluasi TPS3R | 1 kali | - kali | 0 kali | 0 kali | 0,00 | 1 | 1 kali | 100 |
| | | Jumlah Evaluasi prokasih | 1 kali | - kali | 2 kali | 1 kali | 0,00 | 1 | 1 kali | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|----------------|------------|---------------|---------------|---------|------|-------------|-----------|
| 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase Sampah dikelola | 30,5 persen | 24 persen | 24 persen | | 0,00 | 24,5 | 24,5 persen | 80,33 |
| 2.11.11.2.0 1 | Pengelolaan Sampah | Jumlah layanan Pengelolaan Sampah | 3 layanan | 3 layanan | 3 layanan | 3 layanan | 0,00 | 3 | 3 layanan | 100 |
| | | Persentase Pengelolaan Sampah terlaksana dengan baik | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2.11.11.2.0 1.03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Buldoser yang dipelihara | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 100 | 2 | 2 unit | 100 |
| | | Jumlah Exavator yang dipelihara | 2 unit | 2 unit | 2 unit | - | 0,00 | 2 | 2 unit | 100 |
| | | Jumlah karcis retribusi persampahan/kebersihan | 139 buku 68 | 500 buku | 613 buku 4 | 613 buku 4 | 100 | 9971 | 9971 buku | 71,38 |
| | | Jumlah mobil dinas persampahan yang terbayarkan pajaknya | 23 unit | 19 unit | 23 unit | 23 unit | 100,00 | 23 | 23 unit | 100 |
| | | Jumlah mobil yang dipelihara | 23 unit | 19 unit | 23 unit | 23 unit | 100,00 | 23 | 23 unit | 100 |
| | | Jumlah motor dinas persampahan yang terbayarkan pajaknya | 9 unit | 9 unit | 9 unit | 9 unit | 100 | 9 | 9 unit | 100 |
| | | Jumlah motor yang dipelihara | 9 unit | 9 unit | 9 unit | 9 unit | 100 | 9 | 9 unit | 100 |
| | | Jumlah Pengadaan APD bagi petugas TPA | 180 stell | - stell | 180 stell | 180 stell | 100 | 180 | 180 stell | 100 |
| | | Jumlah Pengadaan APD bagi petugas pungut dan petugas kebersihan | 12 stell | - stell | 12 stell | 12 stell | 100 | 12 | 12 stell | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|
| | | Jumlah pengecekan kesehatan | 1 kali | - kali | 12 kali | 12 kali | 100,00 | 1 | 1 kali | 100 |
| | | Jumlah pakaian kerja dan kelengkapannya yang terbeli | 142 stell | - stell | 142 stell | 142 stell | 100 | 142 | 142 stell | 100 |
| | | Jumlah pengelolaan TPA | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 100 | 1 | 1 lokasi | 100 |
| | | Jumlah rapat koordinasi terlaksana | 12 kali | 3 kali | 12 kali | 12 kali | 100 | 12 | 12 kali | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2.11.11.2.0 1.04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah tersedianya alat pencacah sampah organik | 3 unit | - unit | 3 unit | 3 unit | 100,00 | 5 | 5 unit | 166,67 |
| | | Jumlah mesin pengayah sampah | 1 unit | - unit | 1 unit | 1 unit | 100,00 | - | - unit | 0,00 |
| | | Jumlah sosialisasi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan | 4 kali | - kali | - kali | - kali | 0,00 | - | - kali | 0,00 |
| | | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | 50 indeks | - indeks | - indeks | - indeks | 0,00 | 40 | 40 indeks | 80 |
| | | Jumlah Gerobak Sampah yang tersedia | 10 unit | - unit | - unit | - unit | 0,00 | 72 | 72 unit | 720 |
| | | Jumlah Bank Sampah yang terbentuk | 3 kali | - kali | - kali | - kali | 0,00 | 9 | 9 kali | 300 |
| 2.11.11.2.0 1.07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah ferdepo untuk menampung sampah dari kecamatan | 1 unit | - unit | - unit | - unit | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | Jumlah sarpras pengolah sampah organik dengan konsep integreted farm pada TPS 3R | 2 lokasi | - lokasi | - unit | - unit | 0,00 | - | - unit | 0,00 |
| | | Jumlah TPS 3R terbangun | 1 lokasi | - lokasi | - lokasi | - lokasi | 0,00 | - | - lokasi | 0,00 |
| | | Jumlah armada roda 3 untuk lembaga pengelola sampah tersedia | 3 unit | - unit | - lokasi | - lokasi | 0,00 | - | - lokasi | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------|------------|------------|---|---------|-----|------------|-----------|
| | | Jumlah alat pelindung diri tersedia | 1 paket | - paket | - unit | - | 0,00 | - | - unit | 0,00 |
| | | Jumlah Alat Pencacah sampah tersedia | 1 unit | - unit | - paket | - | 0,00 | - | - paket | 0,00 |
| | | Jumlah Alat Pres sampah tersedia | 1 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | - | - unit | 0,00 |
| | | Jumlah Tempat sampah terpilah, wheelbin, komposter tersedia | 1 paket | - paket | - unit | - | 0,00 | 1 | 1 unit | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | Jumlah timbangan TPS 3R tersedia | 4 unit | - unit | - paket | - | 0,00 | 4 | 4 paket | 100 |
| | | Jumlah Timbangan Digital tersedia | 4 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | - | - unit | 0,00 |
| | | Jumlah APD terbeli | 5 paket | - paket | - unit | - | 0,00 | 1 | 1 unit | 20 |
| | | Jumlah Tas Pemilah sampah tersedia | 3 paket | - paket | - paket | - | 0,00 | 1 | 1 paket | 33,33 |
| | | Jumlah Buku tabungan dan buku administrasi tersedia | 200 buku | - buku | - paket | - | 0,00 | 200 | 200 paket | 100 |
| | | Jumlah getset terbeli | 0 unit | - unit | - buku | - | 0,00 | - | - buku | 0,00 |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan terbeli (DAK) | 0 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | 2 | 2 unit | 0,00 |
| 2.11.11.2.0 3 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta | 2 unit | - unit | - unit | - | 0,00 | 2 | 2 unit | 100 |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta terlasana dengan baik | 100 persen | 100 persen | 100 persen | - | 0,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| 2.11.11.2.0 3.02 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | Monitoring & Penyusunan Laporan Jakstrada (Adipura) | 2 kali | - kali | 0 kali | - | 0,00 | 2 | 2 kali | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|---------|-----|------------|-----------|
| 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 20 | 100 persen | 100 |
| 2.11.02.2.0 1 | <i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah layanan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i> | 2 layanan | 2 layanan | 2 layanan | 2 layanan | 0,00 | 2 | 2 layanan | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | <i>Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten terlaksana dengan baik</i> | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 0,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| 2.11.02.2.0 1.01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen inventarisasi potensi dan permasalahan SDA Kab Gunungkidul tersusun | 0 dokumen | - dokumen | - dokumen | - | 0,00 | 1 | 1 dokumen | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersusun | 0 dokumen | - dokumen | - dokumen | - | 0,00 | - | - dokumen | 0,00 |
| | | Jumlah dokumen RPPLH tersusun | 0 dokumen | - dokumen | - dokumen | - | 0,00 | - | - dokumen | 0,00 |
| 2.11.02.2.0 1.02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Bimtek peningkatan kinerja PLH terlaksana | 1 kali | 2 kali | 1 kali | 1 kali | 100 | 1 | 1 kali | 100 |
| | | Jumlah Bimtek penyusunan laporan pelaksana dokumen lingkungan terlaksana | 1 kali | - kali | 1 kali | 1 kali | 100 | 1 | 1 kali | 100 |
| | | Jumlah rapat koordinasi PPLH terlaksana | 5 kali | - kali | 10 kali | 10 kali | 100 | 5 | 5 kali | 100 |
| | | Jumlah Sosialisasi kebijakan dan peraturan PPLH terlaksana | 2 kali | 1 kali | 2 kali | 2 kali | 100 | 2 | 2 kali | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------------|-----------|
| 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik | 60 persen | 20 persen | 20 persen | 20 persen | 100,00 | 20 | 20 persen | 33,33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 2.11.06.2.0 1 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | 4 layanan | 4 layanan | 4 layanan | 4 layanan | 100,00 | 4 | 4 layanan | 100 |
| | | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| 2.11.06.2.0 1.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah operasional Pemeriksaan UKL-UPL dan Verifikasi/Registrasi SPPL | 12 bulan | - bulan | 2 | 0 | 0,00 | 12 | 12 | 100 |
| | | Jumlah opsional penyelenggaraan Tim uji pelayananan lingkungan hidup kabupaten | 10 bulan | - bulan | - | - | 0,00 | 10 | 10 | 100 |
| 2.11.06.2.0 1.02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah Pelatihan dan bimbingan teknis petugas pengawas LH terlaksana | 1 kali | - kali | - | - | 0,00 | 1 | 1 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------|----|-----------------------|-----------|
| 2.11.06.2.0 1.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 60 usaha dan/kegiatan | 120 usaha dan/kegiatan | 120 usaha dan/kegiatan | 90 usaha dan/kegiatan | 75 | 40 | 40 usaha dan/kegiatan | 66,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | Jumlah bimtek peningkatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan usaha dan/atau kegiatan terlaksana | 1 kali | 1 kali | - kali | - kali | 0,00 | 1 | 1 kali | 100 |
| | | Jumlah bimtek pembuatan laporan pelaksanaan UKL-UPL / RKL-RPL terlaksana | 2 kali | - kali | - kali | - kali | 0,00 | 2 | 2 kali | 100 |
| | | Jumlah Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan bidang LH terlaksana | 2 kali | - kali | - kali | - kali | 0,00 | 2 | 2 kali | 100 |
| 2.11.06.2.0 1.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah sosialisasi klinik pengaduan terlaksana | 2 kali | - kali | - kali | - kali | 0,00 | 2 | 2 kali | 100 |
| | | Jumlah Operasional tim terpadu : Klinik Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan (rakor, honor tim kajaksaan, kepolisian, PPLHD Provinsi, perjalanan dinas, pengujian lab) | 12 bulan | - bulan | - bulan | - | 0,00 | 12 | 12 bulan | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----|---------|------------|-------------------|-----------|
| 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik | 100 persen | 100 persen | 100 persen | | 0,00 | 100 | 100 persen | 100 |
| 2.11.10.2.0 1 | <i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i> | <i>Jumlah Pengaduan Masyarakat di bidang lingkungan hidup</i> | <i>7 aduan</i> | <i>7 aduan</i> | <i>100 persen</i> | | 0,00 | <i>100</i> | <i>100 persen</i> | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| | | <i>Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik</i> | <i>100 persen</i> | <i>100 persen</i> | <i>100 persen</i> | | 0,00 | <i>100</i> | <i>100 persen</i> | 100 |
| 2.11.10.2.0 1.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan yang terselesaikan | 7 aduan | 100 persen | 100 persen | 10 | 10 | 100 | 100 persen | 100 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung dan mencapai tujuan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan alat untuk mencapai kinerja pelayanan sesuai tupoksi yang dimandatkan ke Dinas Lingkungan Hidup

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta indikator kinerja RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Tolok ukur dan indikator kinerja SPM mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Menurut peraturan tersebut ada 4 jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan Kabupaten/Kota yaitu :

1. Pencegahan pencemaran air dengan indikatornya adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air yang merupakan hasil pembagian dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pecemaran air dengan jumlah usaha dan / atau kegiatan yang diawasi dikalikan 100%.
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikatornya adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara yang merupakan hasil pembagian dari jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventaris dikalikan 100%.

3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa dengan indikatornya adalah persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya yang merupakan hasil pembagian dari luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dengan luasan lahan yang diperuntukan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dikalikan 100%.
4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikatornya adalah prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti yang merupakan hasil pembagian dari jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 tahun dikalikan 100%.

Tolok ukur dan indikator kinerja IKK didasarkan pada format IKK untuk kabupaten dalam tataran pelaksanaan kebijakan aspek capaian kinerja urusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang meliputi beberapa indikator berikut:

1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL diukur dengan perbandingan antara jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi dibagi jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL dikalikan 100%.
2. Pengelolaan limbah B3 diukur dengan membandingkan antara jumlah ijin yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan yang wajib memiliki ijin dikalikan 1.000.
3. Pengelolaan limbah B3 yang diawasi diukur dengan membandingkan antara jumlah pengawasan terhadap pengelolaan B3 dibanding jumlah data kegiatan yang memiliki ijin dikalikan 1.000.
4. Penegakan hukum lingkungan diukur dengan membandingkan antara jumlah kasus lingkungan yang ditangani dibagi jumlah kasus lingkungan yang harus ditangani dikalikan 1.000.
5. Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air) diukur dengan membandingkan antara pelaksanaan penetapan status mutu air diukur dengan membandingkan antara jumlah sungai dan/atau danau yang telah ditetapkan statusnya dibagi jumlah sungai dan/atau danau dikalikan 1.000.

Pengendalian potensi sumber pencemaran air diukur dengan membandingkan antara jumlah beban pencemaran air yang telah dikendalikan dibagi jumlah beban pencemaran air yang dihasilkan dikalikan 1.000. Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/atau danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau diukur dengan membandingkan antara jumlah titik pengambilan sampling dibagi jumlah titik pemantauan rutin yang ditetapkan dikalikan 1000.

Tolok ukur dan indikator kinerja didasarkan pada perhitungan teknis, selanjutnya hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gunungkidul

| No | Indikator (IKU, SPM, IKK) | Satuan(IKU, SPM, IKK) | Target Renstra PD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Indeks kualitas lingkungan hidup | indek | 54,47 | 55,47 | | | 64,16 | 65,32 | | | |
| 2 | Penurunan luasan lahan kritis yang terehabilitasi | ha | 7500 ha | 7500 ha | | | 0 | 0 | | | |
| 3 | Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup | nilai | | | 34,6 | 38,35 | | | 34,6 | 38,35 | |
| 4 | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan | persen | | | 50 | 54 | | | 50 | 54 | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif (Widodo, 2001:75). Terkait dengan hal tersebut maka tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan sedangkan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah koordinasi dan sinergisitas dengan dinas instansi terkait yang mempunyai hubungan dalam mewujudkan pemberdayaan pengelolaan lingkungan, pemantauan dan pengawasan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ditemui beberapa permasalahan dan hambatan seperti kurangnya sumber pendanaan, keterbatasan sarana dan prasarana kerja, lemahnya kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta belum adanya tenaga fungsional bidang lingkungan hidup. Permasalahan dan hambatan tersebut diusahakan untuk dapat diatasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada sehingga tidak berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap pencapaian program nasional seperti SPM bidang Lingkungan Hidup dan MDGs

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah bahwa isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi padahal saat ini masalah lingkungan merupakan isu global sehingga mau tidak mau masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu pusat perhatian karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*).

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggaran tugas dan fungsi antara lain :

A. TIMBULAN SAMPAH YANG SEMAKIN MENINGKAT.

1. Peningkatan cakupan pelayanan dari 40% pada tahun 2000 menjadi 70% pada tahun 2015 untuk mencapai total pelayanan secara nasional yang selaras dengan sasaran MDGS memerlukan investasi sarana dan prasarana persampahan yang cukup dan harus didukung oleh kesiapan manajemen dan dukungan peraturan perundang-undangan.

2. Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan sampah secara lebih profesional dengan dukungan SDM yang memadai serta dimungkinkannya kerjasama dengan masyarakat dan swasta untuk melaksanakan penanganan sampah.
3. Penggalian sumber dana untuk investasi terutama dari pihak swasta yang harus sinergi dengan penerapan pola pemulihan biaya (*cost recovery*) secara bertahap.
4. Kondisi TPA yang dioperasikan secara *sanitary landfill* memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dan sumber-sumber air dapat diminimalkan. Perlunya komitmen pihak eksekutif dan legislatif dalam alokasi biaya untuk rehabilitasi TPA dan penyiapan lokasi TPA baru di Desa Banjarejo Kapanewon Tanjungsari.
5. Program 3 R harus dilaksanakan melalui Pendidikan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
6. Sentuhan teknologi sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan TPA terutama berkaitan dengan pemanfaatan gas *landfill*, insinerator ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah lainnya.
7. *Social enforcement* sebagai solusi lemahnya penegakan perda atas pelanggaran pembuangan sampah.

B. BERKURANGNYA PERAN PEMERINTAH DAERAH AKIBAT PENYEDERHANAAN IJIN LINGKUNGAN

1. Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul menghendaki penerapan perencanaan tata ruang (*spatial planning*) yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan adanya standar lingkungan seperti standar ambien untuk air permukaan, air bawah tanah, dan udara sebagai ambang batas baku mutu kegiatan industri sehingga kualitas lingkungan akan bisa lebih terjaga.
2. Penerapan ijin lingkungan dalam setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar setiap usaha atau kegiatan layak secara ekonomis, teknologi dan lingkungan.
3. Ijin lingkungan dalam UU *Omnibus Law* Cipta Kerja disederhanakan sebagai bentuk penyederhanaan ijin untuk memudahkan investasi. Ijin lingkungan hanya berdasarkan komitmen dimana pelaku usaha dapat mendapatkan izin usaha dan izin lingkungan dengan komitmen akan melengkapi persyaratan lainnya kemudian.

Artinya pelaku usaha dapat melangsungkan kegiatan usahanya dengan melengkapi izin di kemudian hari.

4. Ijin lingkungan berfungsi sebagai instrument pencegahan yang dapat membendung dampak negatif pembangunan ekonomi terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. UU Omnibus Law diharapkan dapat menyederhanakan ijin usaha dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup, sehingga diperlukan sebuah kajian yang lebih komprehensif yang mengidentifikasi hambatan berusaha untuk menemukan factor penghambat investasi apakah di aspek substansi perijinan atau di aspek proses perijinan.
6. Kemudahan berusaha dengan menyederhanakan ijin lingkungan seperti dalam UU Cipta Kerja justru menempatkan pelaku usaha dalam kondisi ketidakpastian hukum dan menghilangkan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
7. Penyederhanaan ijin lingkungan juga dilakukan oleh KLHK dengan PermenLHK nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
8. AMDAL dan RDTR tidak bisa untuk disetarakan. RDTR berorientasi pada sebuah kebijakan publik, sementara AMDAL berorientasi pada proyek/kegiatan tertentu. AMDAL adalah instrumen pengendalian dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan dalam skala tapak proyek, sementara RDTR adalah instrumen pengendalian ruang berdasarkan tata guna lahan peruntukan.
9. RDTR hanya mengatur soal zonasi atau peruntukan kawasan dan tidak spesifik mengatur mengenai detail suatu proyek dan tidak mengatur kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti dalam AMDAL. RDTR tidak bisa menggantikan fungsi AMDAL sebagai rangkaian dari izin lingkungan.

C. BELUM ADA KEBIJAKAN TENTANG PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum menata dan menyediakan berbagai bentuk Ruang Terbuka Hijau berdasarkan klasifikasinya dan berdasar pada peraturan yang ada.

2. Dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih ada ketidaksesuaian dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan.
3. RTH Kabupaten Gunungkidul belum mencapai ketentuan yaitu minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.
4. Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gunungkidul diperlukan masterplan untuk memberikan arah dan kepastian pembangunan RTH yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan perencanaan dari bawah dengan berbagai pertimbangan diantaranya ketersediaan SDM, dana, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan faktor – faktor lain yang terkait, berdasarkan skala prioritas sehingga diharapkan perencanaan yang disusun akan mampu menjawab kebutuhan.

Hasil analisis kebutuhan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui forum Musrenbang dengan mempertimbangkan berbagai masukan terhadap rencana program , Kegiatan dan Sub kegiatan dari sisi ketersediaan anggaran, lokasi sasaran, target indikator keluaran dan hasil maka sesuai kondisi pada tahun berjalan dan proyeksi tahun yang akan datang terdapat penyesuaian kegiatan.

Penjelasan temuan – temuan setelah proses pembandingan RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, dilaksanakan dengan mengkaji terhadap perbedaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program , Kegiatan dan Sub kegiatan yang sama tetapi besaran biaya dan ruang lingkup kegiatannya berbeda

Perbandingan data antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
Kabupaten Gunungkidul

| No | Rencana Kerja Pemerintah Daerah | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-------------------------|---|----------------|---------------------|--|------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kab. Gunungkidul, Patuk | Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik | 100 persen | 4.761.541.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kab. Gunungkidul | Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik | 100 persen | 3.221.389.750 | |
| | | | | | | Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | | Jumlah Laporan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 3 Laporan | 90.880.000 | |
| | | | | | | Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang | | Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang | 3 Laporan | 90.880.000 | |
| | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Gunungkidul, Patuk | Jumlah layanan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 1 layanan | 4.761.541.000 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Kab. Gunungkidul | Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 3 dokumen | 3.130.509.750 | |
| | | | | | | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan | Kab. Gunungkidul | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan | 2 dokumen | 2.518.660.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|---------------------------|--|------------------------|---------------|--|------------------|---|-----------|-------------|-----|
| | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu | Kab. Gunungkidul 1, Patuk | Penanaman Vegetasi | 1195 m3 | 4.761.541.000 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu | Kab. Gunungkidul | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu | 1 dokumen | 611.849.750 | |
| | | | Penanaman Vegetasi Terbangunnya Drainase dan Pemipaan Penyiraman | 403m | | | | | | | |
| | | | Terbangunnya Etalase Batu Geopark Gunung Sewu | 28 unit | | | | | | | |
| | | | Terbangunnya Jalan Setapak | 990.4m | | | | | | | |
| | | | Terbangunnya Kolam dan Instalasi | 78m2 | | | | | | | |
| | | | Terbangunnya Pagar Pengaman Tanaman | 560m2 | | | | | | | |
| | | | Terbangunnya Talud | 1.413,39m ³ | | | | | | | |
| | | | Terbangunnya Taman Parkir | 339.10m2 | | | | | | | |
| | | | Tersedianya CCTV | 3 unit | | | | | | | |
| | | | Tersedianya Gazebo | 5 unit | | | | | | | |
| | | | Tersedianya Penerangan | 14 unit | | | | | | | |
| | | | Tersedianya | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Peresapan | | | | | | | | |
| | | | Tersedianya Ramp | 64.8m2 | | | | | | | |
| | | | Tersedianya Septictank Biofil | 1 unit | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---|-------------------------------------|--|------------|----------------------|---|------------------|---|---------------------|----------------------|-----|
| | | | Tersedianya Tangga | 315 m2 | | | | | | | |
| | | | Tersedianya Tempat Cuci Tangan | 8 unit | | | | | | | |
| | | | Tersedianya Tempat Sampah | 15 unit | | | | | | | |
| | | | Tersedianya Toilet | 1 unit | | | | | | | |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik | 100 persen | 5.049.651.411 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Gunungkidul | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik | 100 persen | 5.391.504.578 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 layanan | 47.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4,286 indeks | 50.460.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Forum PD | 1 kali | 8.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 dokumen | 10.400.000 | |
| | | | Jumlah Dokumen Profil | 1 | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Renja PD | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Renja Perubahan PD | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah Dokumen RKA | 1 dokumen | 2.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Gunungkidul | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1.500.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|---------------------------------------|---|-----------|------------|---|------------------|--|------------|------------|-----|
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah Dokumen RKA Perubahan | 1 dokumen | 2.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Gunungkidul | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 dokumen | 2.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah Dokumen DPA | 1 dokumen | 3.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Kab. Gunungkidul | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | 1.500.000 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | |
| | | | Jumlah Dokumen ROPK | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah Dokumen DPA Perubahan | 1 dokumen | 2.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kab. Gunungkidul | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dokumen | 3.000.000 | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah Dokumen LKjIP | 1 dokumen | 30.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Gunungkidul | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17 laporan | 30.560.000 | |
| | | | Jumlah Laporan Monev | 4 dokumen | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---|-------------------------------------|---|------------|----------------------|---|------------------|--|-----------------------|----------------------|-----|
| | | | Jumlah Laporan TEPPA | 12 dokumen | | | | | | | |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 laporan | 1.500.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3 | 4.515.201.411 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul | Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 219,333 indeks | 4.613.337.178 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN | 14 bulan | 4.483.201.411 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Gunungkidul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 644 orang/bulan | 4.580.247.178 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Dokumen laporan akhir tahun | 1 dokumen | 2.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Gunungkidul | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 1.500.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan | 12 dokumen | 30.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab. Gunungkidul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 laporan | 31.590.000 | |
| | | | Jumlah Dokumen Laporan Semesteran | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 2 layanan | 40.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul | Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 25 indeks | 52.050.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|-------------------------------------|--|----------|--------------------|--|------------------|---|------------------|--------------------|-----|
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah ASN yang tertangani | 46 orang | 2.000.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Gunungkidul | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6 dokumen | 1.800.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah ASN yang mengikuti diklat | 2 orang | 38.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Gunungkidul | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 44 orang | 50.250.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 5 | 173.200.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul | Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah | 69 indeks | 232.502.000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah Komponen listrik tersedia | 4 paket | 2.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Gunungkidul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 2.345.000 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah ATK | 12 paket | 90.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Gunungkidul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 aket | 85.119.000 | |
| | | | Jumlah komputer yang terbeli | 2 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah laptop yang terbeli | 2 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah printer yang terbeli | 1 unit | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|-------------------------------------|--|--------------|------------|---|------------------|---|-----------------|--------------------|-----|
| | | | Jumlah Scanner Digital yang terbeli | 1unit | | | | | | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah cetak | 160 bendel | 10.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Gunungkidul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 paket | 10.600.000 | |
| | | | Jumlah fotocopy | 15000 lembar | | | | | | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah rekening langganan surat kabar | 12 rekening | 1.200.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Gunungkidul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 365 dokumen | 2.400.000 | |
| | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Gunungkidul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 laporan | 8.400.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Frekuensi rapat, konsultasi, dan koordinasi dalam daerah | 30 OH | 70.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Gunungkidul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 123.638.000 | |
| | | | Jumlah snack dan minum rapat | 600OR | | | | | | | |
| | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 unit | 109.610.500 | |
| | | | | | | Pengadaan Mebel | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 100 unit | 88.465.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|-------------------------------------|---|-------------|--------------------|--|------------------|--|-------------------|--------------------|-----|
| | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | 2 unit | 21.145.500 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3 layanan | 185.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Gunungkidul | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 63 laporan | 197.494.900 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah surat yang dikelola | 2000 surat | 45.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Gunungkidul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 47.560.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah Rekening Air | 12 rekening | 60.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Gunungkidul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 48 laporan | 59.878.500 | |
| | | | Jumlah Rekening Listrik | 24 rekening | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekening Telepon | 12 rekening | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jasa kebersihan cleaning service | 3 termin | 80.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Gunungkidul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 laporan | 90.056.400 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 layanan | 88.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Gunungkidul | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 224 unit | 136.050.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|---------------------------------------|--|---------|------------|--|------------------|--|---------|------------|-----|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya | 4 unit | 70.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Gunungkidul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 unit | 95.600.000 | |
| | | | Jumlah mobil dinas yang terpelihara | 4 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya | 10 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah motor dinas yang terpelihara | 10 unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah komputer terfasilitasi pemeliharaannya | 15 unit | 8.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Gunungkidul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 65 unit | 12.400.000 | |
| | | | Jumlah laptop terfasilitasi pemeliharaannya | 5 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah mesin ketik terfasilitasi pemeliharaannya | 4 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah printer terfasilitasi pemeliharaannya | 10 unit | | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah gedung yang terfasilitasi pemeliharaannya | 1 unit | 5.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Gunungkidul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 unit | 22.650.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---|---------------------------------------|--|------------|--------------------|--|------------------|--|-------------------|--------------------|-----|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah AC terfasilitasi pemeliharaannya | 12 unit | 5.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Gunungkidul | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 18 unit | 5.400.000 | |
| | Penataan Organisasi | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah layanan Penataan Organisasi | 1 layanan | 1.250.000 | | | | | | |
| | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah Dokumen RTP/SPIP | 2 dokumen | 1.250.000 | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen SOP | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) | 2 dokumen | | | | | | | |
| 3 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 100 persen | 255.000.000 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Kab. Gunungkidul | Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 100 persen | 493.470.000 | |
| | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah layanan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 2 layanan | 255.000.000 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan | Kab. Gunungkidul | Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 31 dokumen | 493.470.000 | |
| | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah dokumen inventarisasi potensi dan permasalahan SDA Kab Gunungkidul tersusun | 1 dokumen | 250.000.000 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 dokumen | 302.350.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|---------------------------------------|---|------------|--------------------|---|-------------------|---|------------------|----------------------|-----|
| | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah Bimtek peningkatan kinerja PLH terlaksana | 1 kali | 5.000.000 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 30 dokumen | 191.120.000 | |
| | | | Jumlah Bimtek penyusunan laporan pelaksana dokumen lingkungan terlaksana | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi PPLH terlaksana | 5 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sosialisasi kebijakan dan peraturan PPLH terlaksana | 2 kali | | | | | | | |
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Kab. Gunungkidul 1. | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 100 persen | 570.000.000 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN | Kab. Gunungkidul. | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 10 persen | 1.180.759.800 | |
| | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1. | Jumlah layanan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 1 layanan | 510.000.000 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul. | Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 2 dokumen | 1.150.759.800 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kab. Gunungkidul 1. | Jumlah bangunan IPAL Komunal di Industri UMKM | 1 unit | 200.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran | Kab. Gunungkidul. | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 dokumen | 913.409.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|---------------------------------------|--|-----------|-------------|--------------------------|------------------|---|-----------|-------------|-----|
| | | | Jumlah buku laporan pemantauan kualitas lingkungan yang tersusun | 1 laporan | | | | | | | |
| | | | Jumlah Forum Komunikasi Pemerhati Kali | 2 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gerakan Kali Bersih | 10 lokasi | | | | | | | |
| | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Jumlah akreditasi/Survailen laboratorium terlaksana | 1 kali | 310.000.000 | Pengelolaan Laboratorium | Kab. Gunungkidul | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 1 dokumen | 237.350.800 | |
| | | | Jumlah alat laboratorium terbeli | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Jumlah alat laboratorium terpelihara | 10 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah bahan kimia terbeli | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Jumlah bimtek Laboratorium terlaksana | 2 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengolahan limbah | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Jumlah peralatan gelas (glassware) dan perlengkapan laboratorium terbeli | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Jumlah Peralatan Laboratorium terbeli | 1 paket | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---|-----------------------|--|------------|----------------------|---|------------------|---|------------------|----------------------|-----|
| | | | Jumlah rapat koordinasi terlaksana | 3 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah Uji Profesiensi terlaksana | 3 kali | | | | | | | |
| | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1 | Jumlah layanan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 2 layanan | 60.000.000 | Penanggulangan Pencemaran | Kab. Gunungkidul | Indeks Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 11 indeks | 30.000.000 | |
| | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Kab. Gunungkidul 1 | Penyusunan Dokumen IKPLHD | 2 dokumen | 30.000.000 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Kab. Gunungkidul | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 2 laporan | 30.000.000 | |
| | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Kab. Gunungkidul 1 | Jumlah Pemantauan kualitas lingkungan untuk penanganan antrax | 20 sampel | 30.000.000 | | | | | | |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Kab. Gunungkidul 1 | Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI) terlaksana dengan baik | 100 persen | 4.180.000.000 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Kab. Gunungkidul | Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI) terlaksana dengan baik | 100 persen | 3.021.337.460 | |
| | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1 | Jumlah layanan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 4 layanan | 4.180.000.000 | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | Jumlah luas Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 35,02 Ha | 3.021.337.460 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---|-----------------------|--|-----------|-------------|---|------------------|---|-------|-------------|-----|
| | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | Kab. Gunungkidul 1 | Jumlah lokasi penanaman Pohon di Geosite | 1 lokasi | 500.000.000 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | Kab. Gunungkidul | Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 10 ha | 360.000.000 | |
| | | | Jumlah lokasi Penanaman Pohon di Sempadan Pantai | 1 lokasi | | | | | | | |
| | | | Jumlah lokasi Penanaman Pohon di Sempadan Sungai | 1 lokasi | | | | | | | |
| | | | Jumlah lokasi penanaman Pohon di Sumber Mata Air | 1 lokasi | | | | | | | |
| | | | Jumlah lokasi penanaman Pohon di tepi Jalan | 1 lokasi | | | | | | | |
| | | | Jumlah lokasi Penghijauan Lingkungan | 1 lokasi | | | | | | | |
| | Pengelolaan Kebun Raya | Kab. Gunungkidul 1 | Jumlah paket Pembangunan di Hutan Kota Tawarsari, Wonosari | 1 paket | 300.000.000 | Pengelolaan Kebun Raya | Kab. Gunungkidul | Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 9 ha | 300.267.500 | |
| | | | Jumlah pengelolaan hutan kota dipelihara | 1 lokasi | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengelolaan shelter bibit di Taman Hutan Kota | 12 bulan | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen DED RTH Batas Kota Rongkop tersusun | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Karangmojo tersusun | 1 dokumen | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---------------------------------------|--------------------|--|-----------|---------------|---------------------------------------|------------------|--|---------|---------------|-----|
| | | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Ponjong tersusun | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Saptosari tersusun | 1 dokumen | | | | | | | |
| | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kab. Gunungkidul 1 | Jumlah dokumen DED RTH Kapanewon Semanu tersusun | 1 dokumen | 3.335.000.000 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Kab. Gunungkidul | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 1,02 ha | 2.316.069.960 | |
| | | | Jumlah dokumen Redesign DED Taman Parkir tersusun | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah Papan Rambu Lingkungan Hidup | 10 unit | | | | | | | |
| | | | Pembangunan RTH taman Parkir | 1 dokumen | | | | | | | |
| | | | Pengembangan Taman Edukasi Wukirsari, Wonosari | 1 lokasi | | | | | | | |
| | | | Jumlah mobil dinas yang terbayarkan pajaknya | 2 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah motor dinas yang terbayarkan pajaknya | 6 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah mobil dinas operasional pemeliharaan taman yang terpelihara | 3 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah motor dinas operasional pemeliharaan taman yang terpelihara | 6 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah pakaian petugas keamanan terbeli | 4 stel | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---|---|--|------------|--------------------|---|---|--|--------------------|-------------------|-----|
| | | | Jumlah pakaian petugas taman terbeli | 22 stel | | | | | | | |
| | | | Jumlah skylift truck terbeli | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah taman terpelihara | 16 taman | | | | | | | |
| | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Kab. Gunungkidul 1, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul 1, Ngawen, Beji | Pengelolaan Taman KEHATI | 3 lokasi | 45.000.000 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus Kab. Gunungkidul, Ngawen, Beji | Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 ha | 45.000.000 | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik | 100 persen | 350.000.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Kab. Gunungkidul | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik | 100 persen | 87.610.000 | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1, Playen, Logandeng | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana | 100 persen | 350.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | Indeks Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 31,5 indeks | 87.610.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---|-------------------------------------|---|----------|-------------|---|-------------------------------------|---|------------|------------|-----|
| | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah operasional Pemeriksaan UKL-UPL dan Verifikasi/Registrasi SPPL | 12 bulan | 250.000.000 | | | | | | |
| | | | Jumlah operasional penyelenggaraan Tim uji pelayanan lingkungan hidup kabupaten | 10 bulan | | | | | | | |
| | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah Pelatihan dan bimbingan teknis petugas pengawas LH terlaksana | 1 kali | 5.000.000 | | | | | | |
| | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah bimtek pembuatan laporan | 2 kali | 60.000.000 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 63 laporan | 61.900.000 | |
| | | | pelaksanaan UKL-UPL / RKL-RPL terlaksana | | | | | | | | |
| | | | Jumlah bimtek peningkatan | 1 kali | | | | | | | |
| | | | pengelolaan dan pemantauan lingkungan usaha dan/atau kegiatan terlaksana | | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|-------------------------------------|---|----------|--------------------|--|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------|-----|
| | | | Jumlah Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan bidang LH terlaksana | 2 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 60 usaha | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah Operasional tim terpadu : Klinik Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan (rakor, honor tim kajaksaan, kepolisian, PPLHD Provinsi, perjalanan dinas, pengujian lab) | 12 bulan | 35.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD | 1 dokumen | 25.710.000 | |
| | | | Jumlah sosialisasi klinik pengaduan terlaksana | 2 kali | | | | | | | |
| 7 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat terlaksana dengan baik | | 445.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Kab. Gunungkidul | Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat terlaksana dengan baik | 100 persen | 282.750.000 | |
| | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik | | 445.000.000 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | Indeks Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 85,667 indeks | 282.750.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---|--|---|-----------|-------------|---|------------------|--|-----------|-------------|-----|
| | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Gunungkidul 1, Tepus, Semua Kelurahan Kab. | Jumlah pelatihan manajemen bank sampah terlaksana | 2 kali | 45.000.000 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Gunungkidul | Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH | 5 lembaga | 49.900.000 | |
| | | Gunungkidul 1, Karangmojo, Semua Kelurahan | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelatihan pemilahan sampah terlaksana | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah pelatihan pengolahan sampah anorganik terlaksana | 2 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah pelatihan pengolahan sampah organik terlaksana | 2 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah pelaku usaha yang menerima sosialisasi (PIS) | 1 kali | | | | | | | |
| | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Kab. Gunungkidul 1, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Frekuensi monitoring Adipura dan Jakstrada | 2 periode | 350.000.000 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Kab. Gunungkidul | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 2 dokumen | 152.850.000 | |
| | | | Jumlah dokumen kelengkapan Adipura yang tersusun | 2 dokumen | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|---|--|------------|------------|--|------------------|---|----------|------------|-----|
| | | | Jumlah Dokumen laporan hasil monitoring Adipura dan Jakstrada tersusun | 2 dokumen | | | | | | | |
| | | | Jumlah pertemuan JPSM terlaksana | 4 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah rumah sampah terbangun | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten | 12 sekolah | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sekolah yang dibina dan dievaluasi dalam pengendalian lingkungan hidup | 40 sekolah | | | | | | | |
| | | | Jumlah sekolah yang didampingi untuk menjadi sekolah Adiwiyata TK DIY dan Nasional serta mandiri | 28 sekolah | | | | | | | |
| | | | Jumlah sosialisai pengelolaan sampah | 10 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah Workshop JPSM terlaksana | 1 kali | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Tegalrejo | Jumlah penyuluhan Ekowisata terlaksana | 1 kali | 50.000.000 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Kab. Gunungkidul | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat | 25 orang | 80.000.000 | |
| | | | Jumlah penyuluhan KEHATI terlaksana | 3 kali | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|-----------------------|--|------------|--------------------|--|------------------|--|------------------|--------------------|-----|
| | | | Jumlah penyuluhan Proklamasi (PIWK) | 3 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah peringatan hari peduli sampah dan hari lingkungan hidup terlaksana | 2 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sosialisasi Pokdarwis (PIWK) | 1 kali | | | | | | | |
| 8 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Kab. Gunungkidul 1 | Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat terlaksana dengan baik | 100 persen | 150.000.000 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Kab. Gunungkidul | Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat terlaksana dengan baik | 100 persen | 201.250.000 | |
| | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1 | Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik | 100 persen | 150.000.000 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | Jumlah entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 6 entitas | 201.250.000 | |
| | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kab. Gunungkidul 1 | Jumlah Evaluasi Bank Sampah | 1 kali | 150.000.000 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kab. Gunungkidul | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 6 entitas | 201.250.000 | |
| | | | Jumlah Evaluasi Kalpataru 4 kategori | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah Evaluasi Prokasih | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah Evaluasi TPS3R | 1 kali | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---|-----------------------|--|------------|----------------------|---|------------------|---|-------------------------|----------------------|-----|
| 9 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Kab. Gunungkidul 1 | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik | 100 persen | 45.000.000 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN | Kab. Gunungkidul | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik | 100 persen | 9.800.000 | |
| | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1 | Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik | 100 persen | 45.000.000 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di | Kab. Gunungkidul | Jumlah dokumen Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 9.800.000 | |
| | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1 | Persentase kasus yang ditangani | 100 persen | 45.000.000 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH | Kab. Gunungkidul | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | 1 dokumen | 9.800.000 | |
| 10 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Kab. Gunungkidul 1 | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 100 persen | 4.830.000.000 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Kab. Gunungkidul | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 100 persen | 4.632.427.500 | |
| | Pengelolaan Sampah | Kab. Gunungkidul 1 | Persentase Pengelolaan Sampah terlaksana dengan baik | | 4.824.000.000 | Pengelolaan Sampah | Kab. Gunungkidul | Indeks Pengelolaan Sampah | 5.718,383 indeks | 4.626.427.500 | |
| | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul 1 | Jumah mobil yang dipelihara | 23 unit | 4.200.000.000 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 16.961,15 ton | 4.397.927.500 | |
| | | | Jumah motor yang dipelihara | 9 unit | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|--------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------------|--|--------------|-------------|-----|
| | | | Jumlah Buldoser yang dipelihara | 2 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah Exavator yang dipelihara | 2 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah karcis retribusi persampahan/kebersihan | 9971 buku | | | | | | | |
| | | | Jumlah mobil dinas persampahan yang terbayarkan pajaknya | 23 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah motor dinas persampahan yang terbayarkan pajaknya | 9 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah pakaian kerja dan kelengkapannya yang terbeli | 142 stel | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengadaan APD bagi petugas pungut dan petugas kebersihan | 12 stel | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pengadaan APD bagi petugas TPA | 180 stel | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengecekan kesehatan | 1 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengelolaan TPA | 1 lokasi | | | | | | | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi terlaksana | 12 kali | | | | | | | |
| | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Kab. Gunungkidul 1 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah | 42.5 indeks | 100.000.000 | Peningkatan Peran serta Masyarakat | Kab. Gunungkidul | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 180 kelompok | 228.500.000 | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|--|-------------------------------------|---|----------|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | | Jumlah Bank Sampah yang terbentuk | 3 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gerobak Sampah yang tersedia | 10 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah mesin pengayak sampah | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah sosialisasi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan | 4 kali | | | | | | | |
| | | | Jumlah tersedianya alat pencacah sampah organik | 3 unit | | | | | | | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Jumlah alat pelindung diri tersedia | 1 paket | 524.000.000 | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Pencacah sampah tersedia | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah Alat Pres sampah tersedia | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah APD terbeli | 5 paket | | | | | | | |
| | | | Jumlah armada roda 3 untuk lembaga pengelola sampah tersedia | 3 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah Buku tabungan dan buku administrasi tersedia | 200 buku | | | | | | | |
| | | | Jumlah ferdepo untuk menampung sampah dari kecamatan | 1 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah getset terbeli | 1 unit | | | | | | | |

| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
|----|---|-------------------------------------|--|------------|-----------------------|---|------------------|---|---------------|-----------------------|-----|
| | | | Jumlah sarpras pengolah sampah organik dengan konsep integrated farm pada TPS 3R | 2 lokasi | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tas Pemilah sampah tersedia | 3 paket | | | | | | | |
| | | | Jumlah tempat sampah terpilah, wheelbin, komposter tersedia | 1 paket | | | | | | | |
| | | | Jumlah Timbangan Digital tersedia | 4 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah timbangan TPS 3R tersedia | 4 unit | | | | | | | |
| | | | Jumlah TPS 3R terbangun | 1 lokasi | | | | | | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta terlasana dengan baik | 100 persen | 6.000.000 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Kab. Gunungkidul | Jumlah unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta | 1 unit | 6.000.000 | |
| | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | Monitoring & Penyusunan Laporan Jakstrada (Adipura) | 2 kali | 6.000.000 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | Kab. Gunungkidul | Jumlah Unit/Usaha/Swasta/ Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja | 1 unit | 6.000.000 | |
| | JUMLAH | | | | 20.636.192.411 | JUMLAH | | | | 18.522.299.088 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mendapatkan kesesuaian program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gunungkidul di bidang lingkungan, telah diselenggarakan berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan baik yang dilaksanakan secara umum melalui Musrenbang Kecamatan maupun yang dilaksanakan secara khusus melalui Forum PD Bidang Lingkungan Hidup. Musrenbang Kabupaten melibatkan beberapa pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait pelayanan bidang lingkungan hidup, LSM, Perguruan Tinggi di Gunungkidul, dan PD terkait. Dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang tersebut didapati berbagai usulan yang sebagian besar sangat terkait dengan isu strategis dan prioritas pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 .Usulan program dan kegiatan dari masyarakat di tahun 2023 . Usulan terdiri dari PIWK dan PIS. Program tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

| No | Usulan | Alamat | Indikator Kinerja | Koefisien/Volume | Harga Satuan (Rp) | Anggaran (Rp) | Catatan |
|----|---|---|--|------------------|-------------------|----------------|---------|
| 1 | Pembangunan IPAL | Tambakrejo RT 04 & Tambakrejo RT 06, Kab. Gunungkidul, Paliyan, Sodo | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 2 | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 | |
| 2 | PIWK - Pemberian Tempat sampah Terpilah | Dunggubah II, Kab. Gunungkidul, Wonosari, Duwet | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 4 | 1.500.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 3 | Pemberian Sarana Bersih Kali | Ringinsari, Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 5 | 5.000.000,00 | 25.000.000,00 | |
| 4 | PIWK - Pemberian Tempat sampah Terpilah | Bulurejo RT 01 RW 03, Kab. Gunungkidul, Semin, Bulurejo | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 1 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Ditolak |
| 5 | PIWK - Pemberian Tempat sampah Terpilah | Ngunut, Playen, Gunungkidul, Kab. Gunungkidul, Playen, Ngunut | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 3 | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | |
| 6 | Pemberian Wadah Limbah B3 Rumah tangga | Kalurahan Karangasem, Kab. Gunungkidul, Ponjong, Karangasem | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 20 | 1.500.000,00 | 30.000.000,00 | |
| 7 | PIWK - Pemberian Tempat sampah Terpilah | Kepuh rt 001 rw 001 Karangawen Girisubo, Kab. Gunungkidul, Girisubo, Karangawen | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 8 | 1.500.000,00 | 12.000.000,00 | |

| No | Usulan | Alamat | Indikator Kinerja | Koefisien/Volume | Harga Satuan (Rp) | Anggaran (Rp) | Catatan |
|-----------|---|---|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| 8 | Pemberian Wadah Limbah B3 Rumah tangga | tukluk tambakromo, Kab. Gunungkidul, Ponjong, Tambakromo | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 21 | 1.500.000,00 | 31.500.000,00 | |
| 9 | PIWK - Pemberian Tempat sampah Terpilah | Padukuhan Gluntung, Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 25 | 1.500.000,00 | 37.500.000,00 | |
| 10 | Pembangunan IPAL | Pulutan, Kab. Gunungkidul, Wonosari, Pulutan | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 1 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
| 11 | PIWK - Pemberian Tempat sampah Terpilah | Omah Godong kelor, Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 2 | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| 12 | Sarana pengolahan sampah organik metode biokonversi | songbanyu, girisubo, gunungkidul, Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 1 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| 13 | PIWK - Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Komplek Kantor Kapanewon Gedangsari, Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) terlaksana dengan baik | 1 | 190.000.000,00 | 190.000.000,00 | |
| 14 | PIWK - Gerakan Kali Bersih | Kepek I, Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 3 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | |

| No | Usulan | Alamat | Indikator Kinerja | Koefisien/Volume | Harga Satuan (Rp) | Anggaran (Rp) | Catatan |
|----|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| 15 | Pemberian Wadah Limbah B3 Rumah tangga | Wonosari, Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 15 | 1.500.000,00 | 22.500.000,00 | |
| 16 | Pemberian Wadah Limbah B3 Rumah tangga | Jalan Sadeng km 4.5 Nlindur Girisubo, Kab. Gunungkidul, Girisubo, Nglindur | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan hidup terlaksana dengan baik | 66 | 1.500.000,00 | 99.000.000,00 | |
| 17 | PIWK - Pemberian Tempat sampah Terpilah | Kalurahan Putat, Kab. Gunungkidul, Patuk, Putat | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 45 | 1.500.000,00 | 67.500.000,00 | |
| 18 | Pembinaan Kelompok peduli lingkungan (Proklim) | Banagung, Kab. Gunungkidul, Girisubo, Tileng | Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat terlaksana dengan baik | 1 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| 19 | PIWK - Pemberian Tempat sampah Terpilah | kalurahan kedungkeris, Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungkeris | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | 6 | 1.500.000,00 | 9.000.000,00 | |
| | | | | JUMLAH | | 1.216.000.000,00 | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Renja ini memuat informasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan rencana tingkat capaian (target) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.

Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan kebijakan baik tingkat nasional maupun propinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Secara nasional prioritas tugas dari bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah : (1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum bidang lingkungan dan kehutanan; (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (5) pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (6) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; (7) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (8) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawaban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai **“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan “** sasaran umum pembangunan yang ingin dicapai adalah lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam secara lestari untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, penegakan aturan hukum lingkungan, pemulihan lingkungan hidup dan meningkatkan pencegahan, mitigasi bencana dan kehatanan masyarakat terhadap bencana. Secara khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH);
2. Peningkatan efektivitas dan kinerja pengelolaan persampahan;

3. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
6. Fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan hidup

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Lingkungan Hidup lima tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran ini didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dikaitkan dengan target Renstra 2021-2026, rumusan tujuan dan sasaran PD merupakan penjabaran dari sasaran daerah yang ditetapkan dengan berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, tema pembangunan tahun 2022 adalah: **“Percepatan Pemulihan Ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022”** Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan ke dalam sasaran Dinas Lingkungan Hidup. Penjabaran sasaran daerah disajikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

| No | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Indikator Sasaran Daerah (Outcome) | Sasaran Dinas Lingkungan Hidup | Indikator Sasaran DLH (Outcome) |
|----|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana | Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup | Nilai Peningkatan tata kelola lingkungan hidup |
| | | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD | Nilai AKIP PD |
| | | | | Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan |

Pemulihan infrastruktur, lingkungan hidup dan peningkatan pengelolaan bencana yang didorong dengan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas sangat penting untuk mewujudkan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022.

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup

| No | Tujuan Dinas Lingkungan Hidup | Indikator Tujuan Dinas Lingkungan Hidup | Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 |
|----|---|--|--|
| 1. | Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup | Nilai peningkatan tata kelola lingkungan hidup | 38,35 |
| 2. | Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan-undangan | 54 |

Meningkatkannya kualitas lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia makhluk lain dan keseimbangan antar keduanya yang bertujuan untuk tercapainya keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Indikatornya adalah tingkat pencemaran lingkungan hidup semakin rendah, tingkat pencemaran akan semakin menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

| NO | Sasaran Dinas Lingkungan Hidup | Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup | Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 |
|----|---|--|--|
| 1 | Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup | Nilai Peningkatan tata kelola lingkungan hidup | 38,35 |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD | Nilai AKIP PD | 80,07 |
| 3 | Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan | 54 |

Indek kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Perangkat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 336/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama

| Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Target Kinerja sasaran Pada Tahun 2023 | Penanggung Jawab | Keterangan/Rumus Formula |
|---|--|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Terwujudnya tata Kelola lingkungan hidup | Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup | 38,35 | Dinas Lingkungan Hidup | Rumus : |
| | | | | Penjumlahan dari : |
| | | | | 20% Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup, |
| | | | | 30% Program Pengelolaan Persampahan , |
| | | | | 10% Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, |
| | | | | 10% Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, |
| | | | | 15% Program Pengelolaan Keanekaragaman Kayati (KEHATI), |
| | | | | 15% Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang |
| Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan | 54 | | Rumus : |
| | | | | Jumlah yang taat dibagi jumlah yang diawasi x 100% |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program merupakan kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sehingga kerangka anggaran dapat menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

- a. Upaya implementasi terhadap tema pembangunan yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Tahun 2022". Yang dijabarkan dalam 7 prioritas pembangunan. Penyusunan program dan kegiatan dipengaruhi oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan bagi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan dalam MDGs. Salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dalam penyelenggaraannya didasarkan pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tanggal 28 November 2008 dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008.

SPM bidang lingkungan hidup ini juga sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja pemerintah bidang lingkungan hidup dalam memberikan pelayanan publik yang mendasar yang berhak diperoleh setiap warganya secara minimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota maka jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup daerah kabupaten adalah:

- a) Pelayanan Pencegahan pencemaran air;
- b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- d) Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 adalah **“Peningkatan Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Infrastruktur dan SDM”**. Tema pembangunan tersebut dijabarkan prioritas dan sasaran daerah sebagai berikut:

1. Ketentraman dan Ketertiban;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Pendidikan dan Kesehatan;
4. Ketahanan Pangan;
5. Ekonomi, UMKM, Investasi, dan Pariwisata;
6. Penanggulangan Kemiskinan;
7. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

Berdasarkan 7 (lima) prioritas pembangunan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam prioritas pembangunan ketujuh yaitu Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Adapun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan untuk pembangunan daerah terincian dalam program / kegiatan /sub kegiatan tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
 Kabupaten gunungkidul

| Prioritas | Sasaran Daerah | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD | Target Sasaran PD | Kode | Program | Pagu Indikatif | PD Penanggungjawab |
|---|--|--|--|--------------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| Infrastruktur, Lingkungan hidup dan Pengelolaan Bencana | Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan | Terwujudnya tata Kelola lingkungan hidup | Nilai Peningkatan tata Kelola lingkungan hidup | 38,35 | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 1.180.759.800,00 | DLH |
| | | | | | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 1.150.759.800,00 | |
| | | | | | 2.11.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 913.409.000,00 | |
| | | | | | 2.11.03.2.01.02 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 237.350.800,00 | |
| | | | | | 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 30.000.000,00 | |
| | | | | | 2.11.03.2.02.01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 30.000.000,00 | |
| | | | | | 2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 3.021.337.460,00 | |

| Prioritas | Sasaran Daerah | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD | Target Sasaran PD | Kode | Program | Pagu Indikatif | PD Penanggungjawab |
|-----------|----------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------|
| | | | | | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 3.021.337.460,00 | |
| | | | | | 2.11.04.2.01.02 | Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | 360.000.000,00 | |
| | | | | | 2.11.04.2.01.03 | Pengelolaan Kebun Raya | 300.267.500,00 | |
| | | | | | 2.11.04.2.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 2.316.069.960,00 | |
| | | | | | 2.11.04.2.01.05 | Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya | 45.000.000,00 | |
| | | | | | 2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 282.750.000,00 | |
| | | | | | 2.11.08.2.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 282.750.000,00 | |
| | | | | | 2.11.08.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 49.900.000,00 | |
| | | | | | 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 152.850.000,00 | |
| | | | | | 2.11.08.2.01.03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | 80.000.000,00 | |
| | | | | | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 201.250.000,00 | |

| Prioritas | Sasaran Daerah | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD | Target Sasaran PD | Kode | Program | Pagu Indikatif | PD Penanggungjawab |
|-----------|----------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------|--------------------|
| | | | | | 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 201.250.000,00 | |
| | | | | | 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 201.250.000,00 | |
| | | | | | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 4.632.427.500,00 | |
| | | | | | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | 4.626.427.500,00 | |
| | | | | | 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 4.397.927.500,00 | |
| | | | | | 2.11.11.2.01.04 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 228.500.000,00 | |
| | | | | | 2.11.11.2.01.07 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | 6.000.000,00 | |
| | | | | | 2.11.11.2.03 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | 6.000.000,00 | |
| | | Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD | Nilai AKIP PD | 80,07 | 2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.391.504.578,00 | |

| Prioritas | Sasaran Daerah | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD | Target Sasaran PD | Kode | Program | Pagu Indikatif | PD Penanggungjawab |
|-----------|----------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|---|-------------------------|--------------------|
| | | | | | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50.460.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10.400.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.500.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.500.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.000.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.000.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.560.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.500.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.613.337.178,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.580.247.178,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.500.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 31.590.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 52.050.000,00 | |

| Prioritas | Sasaran Daerah | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD | Target Sasaran PD | Kode | Program | Pagu Indikatif | PD Penanggungjawab |
|-----------|----------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------|
| | | | | | 2.11.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1.800.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50.250.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 232.502.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.345.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 85.119.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10.600.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.400.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 8.400.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 123.638.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 109.610.500,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | 88.465.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 21.145.500,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 197.494.900,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 47.560.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 59.878.500,00 | |

| Prioritas | Sasaran Daerah | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD | Target Sasaran PD | Kode | Program | Pagu Indikatif | PD Penanggungjawab |
|-----------|----------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------|
| | | | | | 2.11.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 90.056.400,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 136.050.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 95.600.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12.400.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 22.650.000,00 | |
| | | | | | 2.11.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.400.000,00 | |
| | | | | | 1.03.13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 3.221.389.750,00 | |
| | | | | | 1.03.13.5.01 | Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 90.880.000,00 | |
| | | | | | 1.03.13.5.01.06 | Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang | 90.880.000,00 | |
| | | | | | 1.03.13.5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 3.130.509.750,00 | |
| | | | | | 1.03.13.5.02.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan | 2.518.660.000,00 | |

| Prioritas | Sasaran Daerah | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD | Target Sasaran PD | Kode | Program | Pagu Indikatif | PD Penanggungjawab |
|-----------|----------------|---|--|-------------------|----------------------------|---|---|--------------------|
| | | Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan | 54 | 1.03.13.5.02.03 2.11.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 611.849.750,00 493.470.000,00 | |
| | | | | | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 493.470.000,00 | |
| | | | | | 2.11.02.2.01.01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 302.350.000,00 | |
| | | | | | 2.11.02.2.01.02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | 191.120.000,00 | |
| | | | | | 2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 87.610.000,00 | |
| | | | | | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 87.610.000,00 | |

| Prioritas | Sasaran Daerah | Sasaran PD | Indikator Sasaran PD | Target Sasaran PD | Kode | Program | Pagu Indikatif | PD Penanggungjawab |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | 2.11.06.2.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 61.900.000,00 | |
| | | | | | 2.11.06.2.01.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | 25.710.000,00 | |
| | | | | | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 9.800.000,00 | |
| | | | | | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 9.800.000,00 | |
| | | | | | 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 9.800.000,00 | |
| Jumlah | | | | | | | 18.522.299.088 | |

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju tahun 2024
Kabupaten Gunungkidul

Dinas Lingkungan Hidup

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|---|--------|----------|---|---|--|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 3.221.389.750,00 | | | | 4.761.541.000,00 |
| 1 | 3 | 1 3 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik | | 100 persen | 3.221.389.750,00 | | | 100 persen | 4.761.541.000,00 |
| 1 | 3 | 1 3 | 5.0 1 | | Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Laporan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | | 3 Laporan | 90.880.000,00 | | | | |
| 1 | 3 | 1 3 | 5.0 1 | 6 | Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang | Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang | Kab. Gunungkidul | 3 Laporan | 90.880.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |
| 1 | 3 | 1 3 | 5.0 2 | | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | | 3 dokumen | 3.130.509.750,00 | | | 1 dokumen | 4.761.541.000,00 |
| 1 | 3 | 1 3 | 5.0 2 | 2 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan | Kab. Gunungkidul | 2 dokumen | 2.518.660.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----------------|----------|------------------|---|--|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|
| | 3 | 1 3 | 5.0 2 | 3 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu | Kab. Gunungkidul | 2 Dokumen | 611.849.750,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Dokumen | 4.761.541.000,00 |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 2 | 1 1 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 15.295.224.538,00 | | | | 15.348.954.758,00 |
| 2 | 1 1 | 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik | | 100 persen | 5.391.504.578,00 | | | 100 persen | 5.077.954.758,00 |
| 2 | 1 1 | 1 | 2.0 1 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 4.286 indeks | 50.460.000,00 | | | 4.286 indeks | 48.250.000,00 |
| 2 | 1 1 | 1 | 2.0 1 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul | 3 Dokumen | 10.400.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3 Dokumen | 8.000.000,00 |
| 2 | 1 1 | 1 | 2.0 1 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Gunungkidul | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 1 | 1 | 2.0 1 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Gunungkidul | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Dokumen | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 1 | 1 | 2.0 1 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Kab. Gunungkidul | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2 Dokumen | 3.000.000,00 |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----------|----------|------------|---|---|--|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kab. Gunungkidul | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2 Dokumen | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Gunungkidul | 17 Laporan | 30.560.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 17 Laporan | 30.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Gunungkidul | 4 Laporan | 1.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4 Laporan | 1.250.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 219.333 indeks | 4.613.337.178,00 | | | 219.333 indeks | 4.515.904.758,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Gunungkidul | 644 Orang/bulan | 4.580.247.178,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 644 Orang/bulan | 4.483.904.758,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Gunungkidul | 1 Laporan | 1.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Laporan | 2.000.000,00 |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----------|----------|------------|---|---|---|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Gunungkidul | 13 Laporan | 31.590.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 13 Laporan | 30.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 25 indeks | 52.050.000,00 | | | 25 indeks | 48.500.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kab. Gunungkidul | 6 Dokumen | 1.800.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 6 Dokumen | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kab. Gunungkidul | 44 Orang | 50.250.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 44 Orang | 46.500.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 69 indeks | 232.502.000,00 | | | 69 indeks | 175.300.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kab. Gunungkidul | 4 Paket | 2.345.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 4 Paket | 2.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kab. Gunungkidul | 13 Paket | 85.119.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 13 Paket | 90.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kab. Gunungkidul | 5 Paket | 10.600.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5 Paket | 10.000.000,00 |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----------|----------|------------|----------|---|---|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Kab. Gunungkidul | 365 Dokumen | 2.400.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 365 Dokumen | 1.200.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Gunungkidul | 12 Laporan | 8.400.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 12 Laporan | 2.100.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Gunungkidul | 12 Laporan | 123.638.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 12 Laporan | 70.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 102 unit | 109.610.500,00 | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kab. Gunungkidul | 100 unit | 88.465.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kab. Gunungkidul | 2 unit | 21.145.500,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 75 laporan | 197.494.900,00 | | | 75 laporan | 185.000.000,00 |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----------|----------|------------|---|---|--|------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Gunungkidul | 24 Laporan | 47.560.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 24 Laporan | 45.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kab. Gunungkidul | 48 Laporan | 59.878.500,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 48 Laporan | 60.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kab. Gunungkidul | 3 Laporan | 90.056.400,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 3 Laporan | 80.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 71 unit | 136.050.000,00 | | | 71 unit | 105.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kab. Gunungkidul | 14 Unit | 95.600.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 14 Unit | 75.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Kab. Gunungkidul | 38 Unit | 12.400.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 38 Unit | 10.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Gunungkidul | 1 Unit | 22.650.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Unit | 10.000.000,00 |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----------|----------|------------|----------|---|---|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kab. Gunungkidul | 18 Unit | 5.400.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 18 Unit | 10.000.000,00 |
| 2 | 1 | 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik | | 100 persen | 493.470.000,00 | | | 100 persen | 450.000.000,00 |
| 2 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | | 31 dokumen | 493.470.000,00 | | | 31 dokumen | 450.000.000,00 |
| 2 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | Kab. Gunungkidul | 1 Dokumen | 352.350.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 |
| 2 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | 30 Dokumen | 191.120.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 30 Dokumen | 250.000.000,00 |
| 2 | 1 | 3 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan lingkungan hidup terlaksana dengan baik | | 100 persen | 1.175.075.000,00 | | | 100 persen | 570.000.000,00 |
| 2 | 1 | 3 | 2.0 | 1 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | 2 dokumen | 1.145.075.000,00 | | | 2 dokumen | 540.000.000,00 |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----------|----------|------------|---|--|--|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| 2 | 1 | 3 | 2.0 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Kab. Gunungkidul | 1 Dokumen | 913.409.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Dokumen | 200.000.000,00 |
| 2 | 1 | 3 | 2.0 | 3 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | Kab. Gunungkidul | 1 Dokumen | 237.350.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Dokumen | 340.000.000,00 |
| 2 | 1 | 3 | 2.0 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | 2 laporan | 30.000.000,00 | | | 2 laporan | 30.000.000,00 |
| 2 | 1 | 3 | 2.0 | 1 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Kab. Gunungkidul | 2 laporan | 30.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2 laporan | 30.000.000,00 |
| 2 | 1 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) terlaksana dengan baik | | 100 persen | 3.021.337.460,00 | | | 100 persen | 4.090.000.000,00 |
| 2 | 1 | 4 | 2.0 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah luas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | | 35.02 Ha | 3.021.337.460,00 | | | 35.02 Ha | 4.090.000.000,00 |
| 2 | 1 | 4 | 2.0 | 2 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10 Ha | 360.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 10 Ha | 500.000.000,00 |
| | | | | | | | Kab. Gunungkidul , Playen, Logandeng | | | | | | |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------|---|----------|---|--|--|--|-------------------|----------------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 2 | 1 1 | 4 | 2.0 1 | 3 | Pengelolaan Kebun Raya | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul , Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul , Playen, Logandeng | 9 Ha | 300.267.500,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 9 Ha | 800.000.000,00 |
| 2 | 1 1 | 4 | 2.0 1 | 4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul , Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul , Playen, Logandeng | 1.02 Ha | 2.316.069.960,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1.02 Ha | 2.745.000.000,00 |
| 2 | 1 1 | 4 | 2.0 1 | 5 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | 15 Ha | 45.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 15 Ha | 45.000.000,00 |
| 2 | 1 1 | 6 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik | | 100 persen | 87.610.000,00 | | | 100 persen | 95.000.000,00 |

| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|--------|---|----------|---|---|---|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 2 | 1 1 | 6 | 2.0 1 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | 31.5 indeks | 87.610.000,00 | | | 31.5 indeks | 95.000.000,00 |
| 2 | 1 1 | 6 | 2.0 1 | 3 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | 63 Laporan | 61.900.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 63 Laporan | 60.000.000,00 |
| 2 | 1 1 | 6 | 2.0 1 | 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD | Kab. Gunungkidul | 1 Dokumen | 25.710.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Dokumen | 35.000.000,00 |
| 2 | 1 1 | 8 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat terlaksana dengan baik | | 100 persen | 282.750.000,00 | | | 100 persen | 505.000.000,00 |
| 2 | 1 1 | 8 | 2.0 1 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 85.667 indeks | 282.750.000,00 | | | 85.667 indeks | 505.000.000,00 |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|-----|---|---|--|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 2 | 1 | 8 | 2.0 | 1 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | Kab. Gunungkidul | 5 Lembaga | 49.900.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 5 Lembaga | 50.000.000,00 |
| 2 | 1 | 8 | 2.0 | 2 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | Kab. Gunungkidul | 2 Dokumen | 152.850.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 2 Dokumen | 405.000.000,00 |
| 2 | 1 | 8 | 2.0 | 3 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | Kab. Gunungkidul | 250 Orang | 80.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 250 Orang | 50.000.000,00 |
| 2 | 1 | 9 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat terlaksana dengan baik | | 100 persen | 201.250.000,00 | | | 100 persen | 160.000.000,00 |
| 2 | 1 | 9 | 2.0 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah entitas Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 6 entitas | 201.250.000,00 | | | 6 entitas | 160.000.000,00 |
| 2 | 1 | 9 | 2.0 | 1 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | Kab. Gunungkidul | 6 Entitas | 201.250.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 6 Entitas | 160.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik | | 100 Persen | 9.800.000,00 | | | 100 Persen | 55.000.000,00 |

| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|-----|---|--|--|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | | 1 dokumen | 9.800.000,00 | | | 1 dokumen | 55.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | Kab. Gunungkidul | 1 Dokumen | 9.800.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Dokumen | 55.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengelolaan persampahan terlaksana dengan baik | | 100 persen | 4.632.427.500,00 | | | 100 persen | 4.346.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | | Pengelolaan Sampah | Indeks Pengelolaan Sampah | | 8570.57 indeks | 4.626.427.500,00 | | | 8570.57 indeks | 4.340.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kab. Gunungkidul | 16961.15 Ton | 4.397.927.500,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 16961.15 Ton | 4.240.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 4 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | Kab. Gunungkidul | 180 Kelompok | 228.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 180 Kelompok | 100.000.000,00 |
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Jumlah unit Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak swasta | | 1 unit | 6.000.000,00 | | | 1 unit | 6.000.000,00 |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|-----|---|---|---|------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|---|--------|--------------------------|
| 2 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah | Jumlah Unit/Usaha/ Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja | Kab. Gunungkidul | 1 Unit | 6.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | 1 Unit | 6.000.000,00 |
| | | | | | JUMLAH | | | | 18.572.244.088,00 | | | | 20.110.495.758,00 |

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun dengan berpedoman RKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 telah mengakomodir hasil perencanaan partisipatif melalui Musrenbang yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan dan sinkronisasi rencana kegiatan serta penyelarasan program dan kegiatan dari tingkat desa sampai pemerintah pusat, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan akan melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasil kegiatan.

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan berkualitas, dan terukur dapat dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA